

Bahan Ajar Filsafat Sosial dan Politik

1

Sunaryo
Universitas paramadina

Daftar isi

2

1. Pengantar: Apa itu Filsafat Sosial dan Politik?
2. Filsafat Politik Plato
3. Filsafat Politik Aristoteles
4. Filsafat Politik Al-Farabi
5. Al-Ahkam al-Sulthaniyya Al-Mawardi
6. Ibn Taimiyah
7. Filsafat Politik Hobbes
8. Filsafat Politik John Locke
9. Teori Kontrak Rousseau
10. Teori Keadilan John Rawls
11. Entitlement Theory of Justice Robert Nozick
12. Politik Pengakuan Charles Taylor
13. Kembali pada Makna Politik
14. Kualitas Hidup dan Kapabilitas

Pengantar

3

Apa itu Filsafat Sosial dan Politik?

- Filsafat sosial dan politik adalah kajian reflektif mengenai institusi politik dan kemasyarakatan.
- Beberapa pertanyaan dasar dalam filsafat politik di antaranya adalah:
 - Apa itu negara?
 - Mengapa harus ada negara?
 - Dari mana sumber kekuasaan negara?
 - Adakah batas-batas kekuasaan negara?
 - Adakah kemungkinan di mana negara itu tidak ada?

Apa itu Masyarakat?

5

- Sementara pertanyaan dalam filsafat sosial jauh lebih tua.
- Apa itu masyarakat?
- Apa hubungan antara negara dan masyarakat?
- Nilai apa yang harus dibangun dalam masyarakat?
- Apa itu masyarakat yang baik?
- Dan apa itu masyarakat yang buruk?

Empat Peran Filsafat Politik

6

- Menurut John Rawls, ada empat peran utama Filsafat Politik:
- Peran pertama filsafat politik adalah untuk meminimalisasi potensi konflik politik yang memecah dan memastikan adanya sebuah tatanan (*order*). Peran ini bersifat praktis. Karya-karya seperti Locke, *Letter on Toleration* (1689), *the Second Treatise* (1689), karya Montesquieu *The Spirit of Laws* (1748), dan karya Hobbes *Leviathan* (1652) adalah beberapa karya yang berupaya mengambil peran filsafat politik yang dimaksud Rawls.
- (...its practical role arising from divisive political conflict and the need to settle the problem of order)

Peran Kedua

7

- Kedua, filsafat politik memiliki kontribusi dalam memandu cara berpikir kita mengenai institusi sosial dan politik sebagai institusi besar yang terpisah dari institusi yang lebih kecil seperti individu, keluarga, dan kelompok. Dalam hal ini, Rawls memahami tujuan dasar institusi sosial dan politik jelas berbeda dari insitusi yang ada di dalam keluarga atau asosiasi. Peran kedua ini menjadi semacam orientasi.
- (...political philosophy may contribute to how a people think of their political and social institutions as a whole, and their basic aims and purposes as a society with a history - a nation - as opposed to their aims and purposes as individuals, or as members of families and associations.)

- Ketiga, filsafat politik juga berfungsi sebagai rekonsiliasi atas rasa frustrasi dan kemarahan kita terhadap realitas. Filsafat politik memberikan dasar mengenai insititusi yang rasional. Berbeda dengan realitas kultur komunitas yang kadang tidak rasional.
- (...political philosophy may try to calm our frustration and rage against our society and its history by showing us the way in which its institutions, when properly understood from a philosophical point of view, are rational, and developed over time as they did to attain their present, rational form.)

- Keempat, filsafat politik juga bisa dilihat sebagai utopia yang (sebenarnya masih) realistis, dengan memeriksa batas-batas kemungkinan politik praktisnya. Kita berharap bahwa pada suatu saat nanti, masyarakat berdiri di atas sebuah sistem politik yang lebih wajar (*decent*) dari perspektif keadilan.
- (We view political philosophy as realistically utopian: that is, as probing the limits of practical political possibility)

- Pada masa Nabi sendiri pada dasarnya tidak ada istilah langsung untuk menyebut politik (*al-siyasah* adalah istilah yang baru lahir kemudian), namun ajaran dan praktik Nabi sendiri jelas bisa diterjemahkan sebagai politik.
- Beberapa konsep yang mengandung nilai politik itu adalah konsep Madinah, keadilan, hukum, kehormatan manusia, hak milik, perdamaian dan lain-lain.
- Ini hanya beberapa konsep yang merupakan esensi dari politik itu sendiri.

Islam, al-Din dan Maqashid al-Syari'ah

11

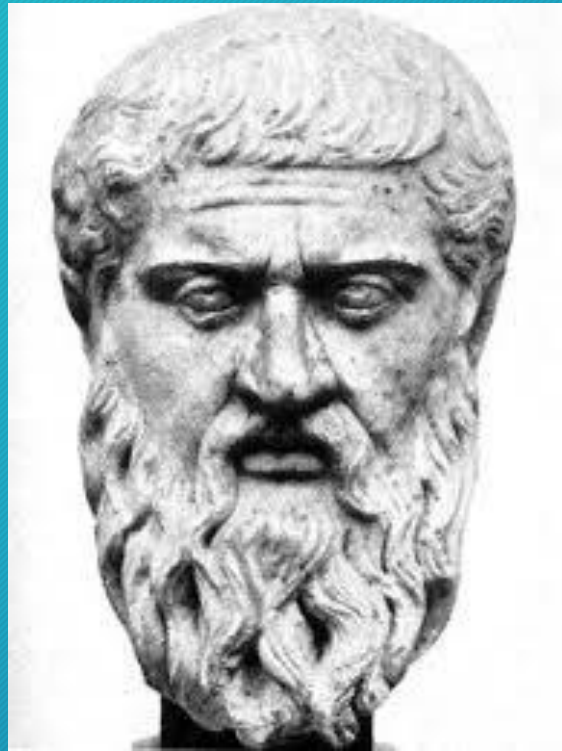
- Untuk memahami Politik Islam, kita pertama-tama perlu memahami secara baik makna Islam, al-Din, dan Maqashid al-Syari'ah.
- Islam dan al-Din adalah pengertian yang saling mengandaikan. Din kita maknai sebagai janji primordial manusia, dan Islam sebagai bentuk pengejawantahan janji itu.
- Sementara Maqashid al-Syari'ah adalah tentang alasan atau dasar mengenai hukum atau aturan dalam ajaran Islam.

Filsafat Politik Plato

12

Plato (429?-347 B.C.E.)

13



Tentang *Republic (Politeia)*

14

- Menurut para ahli, proyek utama dari *Republic (Politeia)* adalah mencari makna keadilan.
- Keadilan dipahami sebagai keutamaan moral yang mengatur perilaku seseorang terhadap orang lain.
- Tema ini dijelaskan oleh Plato dalam dialog Sokrates bersama dengan Cephalus, Polemarchus dan Thrasymachus dalam Buku I.
- Oleh banyak ahli, diskusi mengenai keadilan ini sebenarnya lebih dikategorikan sebagai kajian dari filsafat moral, bukan filsafat politik.

Politeia dan kewargaan

15

- Namun demikian, beberapa persoalan yang dibahas dalam buku ini dinilai relevan dengan tema filsafat politik dan sosial. Misalnya masalah pendidikan, aturan mengenai perkawinan, peran perempuan dalam masyarakat.
- Makna utama dari Politeia adalah kewarganegaraan (*citizenship*), yakni mengenai kondisi menjadi warga negara. Di dalam karya ini terkandung uraian mengenai sistem hukum dan praktik yang menata kehidupan warga Negara. Dalam arti tertentu, Politeia dapat dimaknai sebagai cara hidup kota.

Polis=Negara?

16

- Seorang sejarawan pemikiran Perancis, Alexander Koyré, menolak pandangan modern yang mengatakan bahwa bagi Plato, politik adalah studi mengenai negara.
- Uraian Plato mengenai Athena dan Sparta kerap kali dipahami oleh pikiran modern sebagai studi mengenai negara. Dalam pandangannya, istilah negara kurang terlalu cocok untuk dilekatkan pada entitas politik Yunani kuno.
- Karena mereka pada waktu itu hanya menyebutnya sebagai polis atau kota. Bagi Plato dan juga Aristoteles, kota adalah bentuk paling komplis dari komunitas yang ada di sana.

Awal mula negara

17

- Dalam Politeia, Plato pernah menguraikan bagaimana negara terjadi.
- Katanya, “...jadi menurut saya negara terjadi karena seorang individu tidak merasa cukup pada dirinya sendiri, melainkan membutuhkan banyak penolong... Demikianlah yang satu membantu yang lain, yang satu untuk kebutuhan yang satu, yang lain untuk kebutuhan yang lain. Dan keanekaragaman kebutuhan terkumpul pada suatu tempat bagi mereka yang membutuhkan dan mereka yang memberikan, pada suatu pemukiman bersama yang kita sebut sebagai negara... Jika perlu orang yang satu membagikan miliknya untuk yang lain atau menerima dari yang lain, karena ia menganggapnya menguntungkan. Begitulah berdirinya negara dalam pemikiran sejak permulaan. Alasan berdirinya negara, seperti yang diuraikan tadi adalah kebutuhan kita... Kebutuhan yang pertama dan terbesar adalah pengadaan bahan pangan demi eksistensi dan kelangsungan hidup...”

Peran Pendidikan dalam Membentuk Masyarakat

18

- Pendidikan adalah hal sangat diperhatikan dalam Politeia. Untuk membentuk sebuah masyarakat yang ideal, hal yang perlu dibangun bukan hanya institusi politik, tetapi juga ide dan praktik untuk membangun budaya masyarakat.
- Menurut Diskin Clay, bagi Plato hukum tertulis (nomoi) tidak akan memadai untuk membentuk masyarakat yang ideal tanpa peran dari pendidikan kewargaan lewat kebiasaan (custom/nomos). Karenanya peran yang sangat penting untuk membentuk masyarakat yang baik adalah pendidikan. Hal ini dikatakan oleh Plato dalam Buku 4 dari Republic.

Manusia Goa

19

- Pentingnya peran pendidikan ini juga digambarkan dalam ilustrasi mengenai manusia goa Plato untuk menunjukkan antara orang terdidik (paedeia) dan tidak terdidik (apaedeusia/uneducated/uncivilized).
- Menurutnya orang-orang yang ada di dalam gua hanya melihat bayang dari luar lewat tembok yang ada di dalam gua. Mereka menerima nilai dan ide tanpa pernah mengkritisi nilai-nilai itu.

- Menurut Diskin Clay, bagian terbesar dari buku *Laws* Plato adalah uraian mengenai akulturasi daripada legislasi. Di dalam karya itu ia lebih menjelaskan mengenai pelatihan, akulturasi, pendidikan, persuasi dalam membentuk kota kecil dari warga yang bebas dari 5040 rumah tangga (di kota Magnesia).
- Materi pendidikan yang diajukan oleh Plato mencoba untuk mengembangkan nilai keutamaan (virtue). Pendidikan didesain untuk membentuk sebuah masyarakat yang baik.

Demokrasi dan Kebebasan

21

- Pandangan Plato lewat *Republic* justru kurang setuju dengan model demokrasi yang berlangsung di Athena. Ia menggambarkan rakyat Athena sebagai orang bodoh, mudah tertipu dan seperti orang tua yang terlampau penurut.
- Namun penafsir yang lain seperti Peter Euben melihat dialog-dialog Platonik justru menggambarkan sebuah model demokrasi deliberatif ala Habermasian. Dalam membuat sebuah putusan diandaikan bahwa setiap orang yang terlibat memiliki hak dan kebebasan yang sama. Proses diskusinya dilakukan secara transparan dan bernalar.

Plato on Democracy

22

- Dalam buku *Plato on Democracy*, Thanassis Samaras mencoba merangkum pandangan Plato mengenai demokrasi. Menurutnya jika membaca *Republic*, demokrasi dinilai tidak efisien secara politik dan destruktif secara moral sehingga ia menolak dengan tegas.
- Namun di dalam *Laws*, pandangannya mengenai demokrasi berubah. Pada level tertentu, menurut Plato, sistem demokrasi memberikan kontribusi pada terbentuknya kota Yunani yang lebih manusiawi.

Pengetahuan Arkitektonik

23

- Seorang negarawan diumpamakan dengan peran seorang ahli arsitek bangunan (*architectôn*). Seorang ahli arsitek bukan seorang pekerja, melainkan pengatur bagi para pekerja. Seorang ahli memiliki pengetahuan yang baik dan bisa memerintah dengan basis pengetahuan itu.
- Pengetahuan mengenai politik memiliki kesamaan dengan pengetahuan arkitektonik. Seorang ahli politik mengetahui apa yang dimaksud dengan baik dan buruk.

Filsafat, Kekuasaan, Raja

24

- Dalam pandangan Plato, tugas utama filsafat adalah mengerti hakikat yang baik (*the nature of the good*) dan hakikat pengetahuan.
- Hal yang membuat seseorang layak untuk menjadi penguasa atau raja adalah karena mengerti hakikat pengetahuan mengenai bagaimana memerintah.

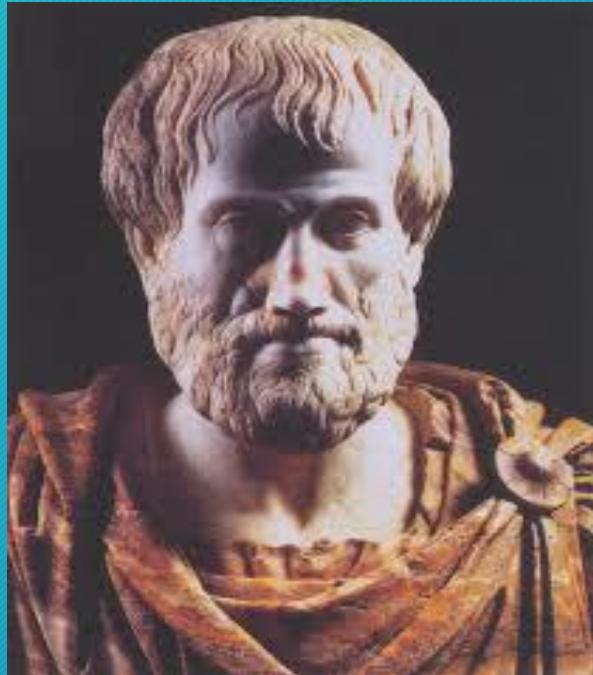
- Plato menjelaskan mengapa seorang raja harus seorang filsuf.
- Bagi Plato, seorang raja adalah orang yang mengerti mengenai yang baik (*the good*). Yang ia maksud dengan yang baik adalah baik itu sendiri (*the good itself*) dan baik sebagaimana adanya (*the good as such*).
- Dalam pandangannya pengetahuan mengenai yang baik bagi seorang raja sangat penting karena pengetahuan itu dapat menuntunnya untuk mengantarkan kekuasaan dan rakyatnya menuju yang baik juga.

FILSAFAT POLITIK ARISTOTELES

26

Aristoteles (384 sm-322sm)

27



Tentang Aristoteles

28

- Secara pribadi, Aristoteles berasal dari keluarga kaya sehingga memungkinkan ia untuk menulis dan berfilsafat.
- Dia lahir 384 SM di Stagira, sebuah kota di dekat laut Aegean sebelah utara Yunani dan besar di Pella di kediaman kerajaan Makedon.
- Ia pindah ke Athena pada umur 17 tahun untuk “nyantri” di Akademia milik Plato.
- Ia tinggal di Athena hingga Plato meninggal pada 348/7 SM dan kembali ke Athena pada 335/4 hingga 323 SM.

Makedonia dan Athena

29

- Ia keluar masuk Makedonia-Athena, karena kekuasaan Makedonia semakin bertambah di Athena dan ada kebencian orang Athena terhadap kerajaan Makedon.
- Ayah Aristoteles, Nicomachus adalah ahli fisika untuk kerajaan Makedonia, yakni Amyntas III.
- Setelah belajar di Athena, Aristoteles memiliki hubungan dekat dengan penguasa Makedonia berikutnya, Philip, dan menjadi tutor bagi Alexander (Alexander Agung).
- Pada 338, Philip berhasil menaklukan Athena dan Corinth sehingga menguasai seluruh Yunani.
-

Alexander Naik Takhta

30

- Setelah Philip mati dibunuh, Alexander kemudian naik takhta.
- Pada saat itu, Aristoteles kembali ke Athena dan mengajar di sekolah yang ia dirikan sendiri Lyceum.
- Ia ke Makedonia ketika Alexander meninggal pada 323.
- Dapat dikatakan bahwa peristiwa penting yang melingkupi kehidupan Aristoteles adalah kenaikan kekuasaan bangsa Makedonia dan dominasinya atas Athena.

Politics dan Nicomachean Ethics

31

- Ada dua karya yang perlu dibaca untuk melihat pandangan politik Aristoteles, yang pertama adalah *Politics (Politikon)* dan yang kedua *Nicomachean Ethics (Ethikon Nikomacheion)*.
- Untuk memahami pandangannya mengenai politik, kita harus memulai dari etikanya. (bisa dilihat pada materi mengenai Etika Aristoteles!)

Etika dan Politik

32

- Tujuan utama dalam buku 1 Nicomachean Ethics adalah menjelaskan hakikat mengenai yang baik (*the good*) bagi semua manusia.
- Dalam buku VII dan VIII Politics ia menjelaskan bahwa kehidupan yang kaya dapat terwujud jika institusi sosial bisa merefleksikan pemahaman yang baik mengenai kebahagiaan (happiness).

Susunan buku *Politics*

33

- Tentang buku *Politics*, editor modern biasanya membagi dalam susunan berikut:
- Buku I : Rumah tangga dan kota
- Buku II, VII, VIII : Konstitusi ideal
- Buku III : warga Negara dan konstitusi (yang ideal dan yang menyimpang)
- Buku IV-VI : konstitusi tidak ideal

Buku VII dan VIII *Politics*

34

- Buku VII dan VIII *Politics*, Aristoteles mencoba menghadirkan sebuah kota ideal yang mungkin bisa diwujudkan.
- Ia mengakui bahwa kemungkinan untuk mewujudkan sebuah masyarakat ideal juga ditopang oleh sebuah keberuntungan yang baik (*good fortune*).
- Namun hal itu tentu saja bukan satu-satunya. Kita juga perlu memerhatikan aspek sumber daya, materi dan manusia.

Disagreement dalam Politik

35

- Hal yang juga disadari dalam *Politics* Aristoteles adalah bahwa ketidaksepakatan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam politik.
- Salah satu tujuan dari institusi politik adalah untuk membangun prosedur yang efektif dan fair dalam memecahkan masalah perbedaan ini.

Kota dan Konstitusi

36

- Ia juga mengatakan bahwa dalam upaya membentuk sebuah kota yang baik, kita perlu merumuskan konstitusi terbaik.
- Konstitusi bukan hanya soal distribusi kekuasaan tetapi juga soal cara hidup.
- Dalam hal ini, yang membuat sebuah kota menjadi baik adalah sejauh mana kota itu dituntun oleh tujuan yang terbaik (*best ends*).
- Namun ia mengakui bahwa setiap warga dalam kota tidak semua sepakat soal kebaikan tertinggi (*the highest good*).

Pendidikan

37

- Dalam pandangannya, orang dewasa (*adult*) yang sudah memahami secara salah mengenai yang baik, ia anggap sebagai masa yang telat untuk memperbaiki.
- Seorang pemimpin politik harus mencari cara agar mereka yang memiliki cara pandang yang salah mengenai yang baik tidak mengganggu kelompok yang lain.

Filsafat dan Hidup Yang Baik

38

- Aristoteles berpandangan bahwa jenis hidup paling baik adalah hidup seorang filsuf.
- Karenanya kota terbaik yang dapat dibangun adalah kota yang warganya bisa mengabdikan pada aktivitas berfilsafat.
- Lantas apa yang ia maksud dengan filsafat atau berfilsafat di sini?
- Ia kadang memaknai kata ini secara longgar sebagai sikap mencari.
- Namun kadang ia juga memaknainya secara terbatas sebagai pencarian sistematis atas penyebab utama dari alam semesta.

Pendidikan Dasar

39

- Jika makna ketat yang dipakai, maka ia menuntut semua warga negara melakukan aktivitas filsafat untuk bisa mengerti penyebab utama dari alam semesta secara sistematis.
- Bagi publik kebanyakan, ia hanya menekankan adanya proses pendidikan.
- Anak yang masih kecil dididik belajar menulis, membaca, bernyanyi dan memainkan alat musik.
- Umur 14-17 tahun mereka bisa belajar sesuatu yang lebih dari itu.
- Setelah itu kemudian mereka menerima pendidikan militer.

Berfilsafat dan Kebahagiaan

40

- Dalam hal ini Aristoteles mengasumsikan bahwa dalam setiap komunitas hanya sedikit yang kemudian mengkhususkan menekuni aktivitas sebagai seorang filsuf (dalam arti yang ketat).
- Karenanya jika Aristoteles memahami kota terbaik adalah kota yang warganya bisa beraktivitas filsafat maka pengertian filsafat lebih dimaknai dalam arti longgar.
- Ketika seseorang sudah mulai dewasa, ia bisa diajak beraktivitas yang memiliki kedekatan dengan aktivitas filsafat dalam arti ketat.
- Dengan cara ini diharapkan mereka juga bisa meraih kebahagiaan yang diharapkan.

Fase-fase Pendidikan

41

- Secara detail Aristoteles menggambarkan proses pendidikan seperti berikut.
- Hingga umur 7 tahun, anak-anak dididik oleh orang tuanya di rumah dengan cerita dan permainan.
- Setelah itu mereka dididik oleh kota dan diajarkan oleh guru.
- Mereka diajarkan menulis, membaca, gimnastik, music dan menggambar. Setelah umur 14 mereka diajarkan sesuatu yang lain (Aristoteles tidak menjelaskan secara detail materinya).
- Setelah umur 17, fisik mereka dilatih agar bisa menjadi tentara yang baik.

Pasca Pendidikan?

- Apa yang mereka lakukan setelah melewati semua proses pendidikan itu?
- Seseorang bisa saja terlibat dalam aktivitas politik dan aktivitas kehidupan sehari-hari lainnya.
- Namun menurut Aristoteles, lepas dari aktivitas itu, setiap orang juga harus memiliki waktu senggang (leisure).
- Dalam waktu luang, setiap orang bisa melakukan relaksasi agar kembali bugar pada saat masuk ke aktivitas rutin.

- Salah satu aktivitas yang paling dinikmati dalam kebudayaan Yunani adalah musik. Hal ini bisa dilakukan di rumah atau di tempat umum seperti festival drama yang dibiayai oleh kota.
- Namun menurutnya, di antara banyak waktu luang yang dimiliki, tidak semua hanya untuk tujuan relaksasi agar kembali segar. Di salah satu waktu luang itu, seseorang juga perlu melakukan aktivitas filsafat.

Filsafat Politik Al-Farabi

44

Sunaryo

Tentang Al-Farabi

45

- Al-Farabi (870-950), lahir Farab, Turkistan. Dalam Bahasa Latin namanya dikenal sebagai Alfarabius.
- Ia dikenal sebagai guru kedua (*al-Mu'allim al-Tsāni*) setelah Aristoteles.
- Pandangan filsafatnya dikenal sebagai neoplatonisme.
- Selain *al-Madīnah al-Fādhilah*, karyanya sangat banyak. Ia menulis dan menyebarkan pandangan filsafat Aristoteles dan Platon, tentang fisika dan metafisikanya.
- Ia juga menulis buku mengenai musik: *Musical Treatise (Kitab al-Mūsīq al-Kabīr)*, *On Melody (Fī al-Īqā')* dan *Transition to Melody (al-Nuqlah ilā al-Īqā')*

Pemikiran Filsafat Al-Farabi

46

- Filsafat al-Farabi sangat dipengaruhi oleh Aristoteles, Platon dan filsuf pra-Sokrates.
- Kecenderungan untuk merekonsiliasi Platon dan Aristoteles banyak diinspirasi oleh filsuf Helenis, khususnya Phorphyry (w. 304), murid Plotinus, pendiri Neoplatonisme.
- Al-Farabi menjadi orang pertama yang memperkenalkan neoplatonisme di dunia Muslim.
- Masa al-Farabi dan pemikir yang menjadi pengikut dan pengembang ajarannya adalah salah satu fase yang paling kaya secara intelektual. Masa itu kerap disebut sebagai “Farabisme”.

Akar Neoplatonisme

47

- Filsafat al-Farabi tidak bisa dipisahkan dari Neoplatonisme yang dikembangkan oleh Plotinus.
- Salah satu karya pertama dari tradisi neoplatonisme yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah *The Theology of Aristotle* atau *Kitāb al-Rubūbiyah (Book of Divinity)*.
- Penerjemahnya adalah Abd al-Masīh ibn Nā'imah al-Him'ī.
- Dalam studi-studi terakhir kita mengetahui bahwa karya yang diterjemahkan itu sebenarnya adalah parafrase dari tiga bagian akhir karya Plotinus *Enneads*, bagian IV, V dan VI.
- Karya ini kemungkinan besar ditulis oleh murid Plotinus yakni Porphyry, penulis buku terkenal *Isagoge* (pengantar karya *Categories of Aristotle*).

Buku *al-Madīnah al-Fādhilah*

48

- *Mabādi Ārā Ahl al-Madīnah al-Fādhilah* (Dasar-dasar Pandangan Warga Kota Utama) adalah karya al-Farabi yang paling terkenal.
- Karya ini bukanlah terjemahan atau adaptasi dari karya Yunani, melainkan pemikiran Al-Farabi yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan neoplatonisme.
- Pandangan-pandangannya banyak dipengaruhi oleh Platon dan Aristoteles, dan pemahaman para pemikir Yunani sebelum dan sesudah Plotinus

Isi Buku *al-Madīnah al-Fādhilah*

- Isi buku ini terdiri dari tiga fasal utama, yakni teologi (metafisika), tentang benda-benda alam (fisika) dan tentang tindakan (etika).
- Tiga fasal ini kemudian dijabarkan dalam sembilan belas bab.
- Isi pokok sembilan belas bab itu adalah sebagai berikut. Pada bab pertama, al-Farabi menjelaskan tentang penyebab segala hal yang ada di alam semesta. Realitas ini disebut sebagai hal yang wajib ada (*wājib al-wujūd*). Bab kedua adalah tentang realitas malaikat. Darinya kemudian muncul benda-benda langit. Ketiga adalah tentang benda-benda langit (*al-ajsām al-samāwiyah/heavenly bodies*). Keempat tentang benda-benda yang ada di bawah bulan, yakni benda-benda material (*al-ajsām al-hayūlāniyah/material bodies*). Kelima tentang materi dan bentuk yang merupakan komposisi dari segala substansi. Keenam tentang susunan realitas dari paling bawah (sublunar) hingga paling tinggi (realitas yang ada di atas bulan). Ketujuh tentang sifat benda-benda langit. Kedelapan, penjelasan mengenai terciptanya benda-benda material, dari yang pertama kali muncul hingga kemudian muncul manusia. Kesembilan tentang sifat benda-benda di bawah bulan (sublunar)

Isi Buku *al-Madīnah al-Fādhilah*

50

- Pada bab kesepuluh al-Farabi menjelaskan tentang manusia dan kemampuan atau potensi dari jiwa manusia. Kesebelas tentang fungsi-fungsi organ dalam tubuh manusia. Keduabelas tentang peran-peran organ reproduksi antara laki-laki dan perempuan. Ketigabelas tentang kemampuan berpikir pada manusia (rasio). Di sini dijelaskan tentang beragam kapasitas yang dimiliki oleh akal. Keempatbelas dijelaskan mengenai kapasitas representasi (*al-mutakhayyilah*). Ia adalah perantara antara kemampuan inderawi dan kemampuan rasional. Kelimabelas tentang kebutuhan manusia untuk hidup bersama dan saling membantu. Di sini dijelaskan mengenai asosiasi/perkumpulan (*ijtimā'*) sempurna, pemimpin sempurna dan asosiasi/perkumpulan yang salah. Keenambelas adalah penjelasan mengenai kebahagiaan yang paling tinggi. Ketujuhbelas tentang hal yang harus ada dalam kota utama. Kedelapanbelas tentang pandangan salah yang memunculkan asosiasi dan kota yang salah. Kesembilanbelas tentang prinsip-prinsip yang salah yang darinya kemudian muncul agama yang sesat.

Teori Emanasi

51

- Salah satu teori al-Farabi yang sangat dipengaruhi ajaran neoplatonisme adalah teori emanasi (*al-Faydh* atau *al-Shudūr*).
- Lewat teori itu ia memberikan penjelasan tentang fase transisi (*means of bridging*) dari dunia intelligible ke dunia material.
- Dalam teori ini ia menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk dari Yang Satu (*the One, first Principle/to Hen*) turun ke intelek (*nous*), jiwa (*psyche*) dan alam material secara berurutan.

Proses Emanasi

52

- Dalam *al-Madīnah al-Fādhilah*, al-Farabi menjelaskan proses emanasi dari Yang Satu ke akal pertama.
- Pada bagian paling pertama buku itu ia menguraikan tentang wujud pertama, *the First Being (al-Awwal)* yang menjadi penyebab dari segala yang ada.
- Ia menyebut Yang Satu ini sebagai Yang Paling Baik dan Yang Paling Awal. Tidak ada yang lebih baik dan lebih awal dibanding Yang Satu ini.
- Sepenuhnya, Yang Satu ini terbebas dari segala ketidaksempurnaan dan ketiadaan. Karenanya, Ia abadi dan cukup diri (*self-sufficient*). Yang Satu tidaklah disebabkan oleh sesuatu yang lain dan Ia tidak memiliki bentuk (*form*), karena jika Ia memiliki bentuk maka Ia harus berada dalam materi, dan itu tidak mungkin.

Wajib al-wujud dan mungkin al-wujud

53

- Penyebab pertama ini disebut *wajib al-wujud* (Yang Wajib Ada/*The Necessary Being*).
- Darinya kemudian lahir wujud kedua, yakni entitas *non-corporeal* dan *non material*. Ia disebut sebagai intelek (*the second being*).
- Semua yang lahir dari wujud pertama (*wajib al-wujud*) disebut sebagai *Mungkin al-Wujūd* (Yang Mungkin Ada/*The Contingent Being*).
- Ia disebut *Mungkin al-Wujūd* karena keberadaannya mengandaikan ada penyebab.

Emanasi dan Terciptanya Alam Semesta

54

- Al-Farabi menjelaskan teori emanasinya seperti ini: Wujud Pertama memikirkan zat-Nya, maka lahirlah Wujud Kedua yang kemudian menjadi Akal Pertama. Akal Pertama ini merupakan substansi yang tidak berbadan sama sekali dan tidak berada pada materi.
- Jika Akal Pertama memikirkan zatnya dan Wujud Pertama, maka akan lahir Akal Kedua. Bersamaan dengan munculnya akal kedua ini kemudian lahir langit pertama (*al-falak al-a'la* [الفلك الأعلى]).
- Dan ketika Akal Kedua ini memikirkan zatnya dan Wujud Pertama, maka akan muncul Akal Ketiga bersama bintang-bintang (*al-kawākib* [الكواكب]). Dari Akal Ketiga kemudian melahirkan Akal Keempat bersama planet Saturnus (*zūhal* [زحل]). Akal Kelima lahir bersama Jupiter (*al-musytarī* [المشتري]). Akal Keenam bersama Mars (*al-marīkh* [المريخ]). Akal Ketujuh bersama Matahari (*al-syams* [الشمس]). Akal Kedelapan bersama Venus (*al-zuhrah* [الزهرة]). Akal Kesembilan bersama Merkurius (*'uthārid* [عطارد]). Dan pada akal kesepuluh atau yang terakhir bersama Bulan (*al-qamar* [القمر]).

Atas Bulan dan bawah Bulan

55

- Akal-akal ini disebut sebagai “dunia atas bulan”. Akal-akal ini adalah wujud yang tidak membutuhkan tempat dan materi. Bulan (*lunar*) menjadi batas bagi benda-benda langit yang geraknya melingkar.
- Sementara dunia yang berada di bawah bulan atau sublunar memiliki sifat kekurangan. Dunia di bawah bulan ini berada dalam dimensi waktu.
- Yang termasuk bagian dari isi dunia sublunar ini adalah api, udara, air, tanah (yang kemudian disebut sebagai unsur yang empat), barang tambang, tumbuh-tumbuhan, mahluk non-rasional dan mahluk rasional. Dalam teori emanasi, posisi intelek menempati posisi yang tinggi dan menjadikan *psyche* sebagai penghubung antara intelek dan dunia material.
- Al-Farabi memahami proses emanasi ini sebagai proses yang berlangsung dalam keabadian. Pandangan ini menjadi sumber kontroversi di kalangan teolog Muslim karena dianggap bertentangan dengan pandangan agama yang menganggap hanya Tuhan yang abadi.

- Konsep kota utama menjadi konsep sentral dalam buku *al-Madīnah al-Fādhilah*. Hal yang tidak bisa dihindari dari bahasan ini adalah pandangannya mengenai konsep etika.
- Sama seperti Aristoteles, al-Farabi menempatkan kebahagiaan (*al-sa'ādah*) sebagai tujuan hidup manusia dan menjadi ide utama dalam pandangan etikanya. Menurutnya, tujuan tertinggi yang harus diraih oleh manusia adalah kebahagiaan.
- Kebahagiaan tertinggi lebih dipahami sebagai penyatuan (*union*) dengan akal aktif (*active intellect*) yang menjadi sumber dari segala hal yang dapat dipikirkan (*intelligible*).
- Ia menyebut fase penyatuan ini sebagai *ittishal* atau *qurb*, yakni puncak dari seluruh kebahagiaan yang dikejar oleh manusia.
- Sarana untuk mencapai tujuan (*tahshīl al-sa'ādah*) ini ada empat, yakni melalui jalan teoritis, reflektif, etis dan politis. Ia menyebut sarana ini sebagai empat tipe keutamaan (*four types of virtue*)

Keutamaan teoritis dan praktis

57

- Keutamaan teoritis adalah semua pengetahuan yang tujuan tertingginya adalah untuk mengetahui entitas yang bersifat intelligible.
- Sementara keutamaan etis atau praktis lebih dipahami sebagai kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk (*tamyīz*). Tindakan ini merupakan turunan dari tindakan yang sesuai dengan tuntutan intelektual.
- Seseorang akan dicela jika tidak mampu memfungsikan daya intelektual sebagaimana mestinya. Menurutnya, kemampuan itu hanya mungkin jika seseorang sudah bisa membiasakan sesuatu sebagaimana mestinya sehingga menjadi *habitus* (*malakah*).
- Di fase ini seseorang akan dengan mudah melakukan tindakan pembedaan antara yang baik dan yang buruk. Manusia yang sudah mencapai kemampuan ini akan terlindungi dari hal-hal yang secara moral bersifat jahat, dan akan selalu tertuntun pada jalan yang membawa pada kebahagiaan.

- Menurut Al-Farabi, yang etis atau “*the good*” itu memiliki dua sisi. Pertama, pengetahuan demi dirinya sendiri; kedua pengetahuan yang dikaitkan dengan tindakan.
- Dengan kata lain, filsafat dibagi menjadi dua bagian, teoritis dan praktis. Dua sisi ini, pengetahuan teoritis yang menjadi sarana untuk meraih kebahagiaan dan tindakan yang menjadi pra-kondisi untuk meraih kebahagiaan akan dianggap sebagai bagian dari filsafat.
- Seorang filsuf, bagi al-Farabi adalah pewujudan dari konsep manusia sempurna (*al-insān al-kāmil*). Seorang filsuf bukanlah orang yang menarik diri dari kehidupan sosial.
- Seorang filsuf harus melibatkan diri dengan persoalan pemerintahan dan legislasi untuk memberikan pencerahan kepada para non-filsuf.
- Seorang filsuf adalah guru moral yang memiliki tanggung jawab memperbaiki hal yang dianggap lemah (secara moral).

Filsuf-Raja dan Kota Utama

59

- Karena seorang filsuf adalah orang yang mengerti tentang hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya, maka yang layak untuk menjadi pemimpin dalam sebuah negara adalah seorang filsuf.
- Pandangan ini tentu saja banyak dipengaruhi oleh Platon tentang filsuf-raja (*philosopher-king*).
- Dalam menjelaskan tatanan sosial ia menyebut istilah kunci yang kemudian menjadi judul bukunya yakni *al-Madīnah al-Fādhilah*.
- Secara etimologi, *al-madīnah* diambil dari kata *al-khudhū'* yang berarti ketundukan dan *al-thā'ah* yang berarti ketaatan, dan *al-jarā'* yang berarti penunaian.
- Sementara yang dimaksud dengan kota utama adalah kota yang warganya memiliki pandangan-pandangan utama. .

Asosiasi yang Sempurna dan tidak sempurna

60

- Secara umum Al-Farabi menjelaskan dua macam masyarakat yakni yang sempurna (*al-kāmilat*) dan tidak sempurna (*ghayr al-kāmilat*).
- Yang sempurna itu ada tiga skala, yakni besar (*'uzhmā*), sedang (*wusthā*) dan kecil (*shughrā*).
- Yang besar itu adalah kesatuan bangsa-bangsa dalam satu masyarakat dunia (*al-ma'mūrah*/المعمورة). Yang sedang adalah kesatuan satu bangsa (الامة) yang merupakan bagian dari yang global. Dan yang kecil adalah kesatuan warga kota (المدينة) yang merupakan bagian dari bangsa.
- Sementara yang tidak sempurna (*ghayr al-kāmilat*) adalah persekutuan warga yang lebih kecil dari negara kota, yakni warga desa, persekutuan warga di sebuah jalan, persekutuan di sudut tempat dan yang paling kecil adalah persekutuan di rumah.

Keutamaan dan Kebahagiaan

61

- Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam sebuah kota, warganya bisa bekerjasama untuk kebaikan dan bisa juga untuk kejahatan. Karenanya, tidak semua kota dibentuk untuk meraih kebahagiaan.
- Bagi al-Farabi, kota yang ditujukan untuk meraih kebahagiaan disebut sebagai kota utama (*al-madīnah al-fādhilah*). Persekutuan (*al-ijtimā'* / الاجتماع) yang ditujukan untuk mencapai kebahagiaan disebut sebagai persekutuan utama (الاجتماع الفاضل).
- Bangsa yang kota-kotanya bekerjasama untuk meraih kebahagiaan disebut sebagai bangsa utama (الامة الفاضلة). Dan dunia yang bangsa-bangsanya saling kerjasama untuk meraih kebahagiaan disebut sebagai dunia utama (المعمورة الفاضلة).

Kota Utama dan Manusia Sempurna

- Dalam kota utama (*al-madīnah al-fādhilah*), al-Farabi menjelaskan bahwa pemimpin kota ini bukanlah manusia biasa.
- Menurutnya, kepemimpinan kota utama mensyaratkan dua hal. Pertama, secara alamiah memiliki bakat bawaan, dan kedua memiliki sifat dan kebiasaan yang mendukung bakat alamiahnya.
- Menurutnya, manusia semacam ini adalah manusia yang paling sempurna di antara manusia-manusia yang lain. Karakteristik manusia ini kadang juga disebut sebagai manusia sempurna (*al-insān al-kāmil*).
- Ia adalah manusia yang mengetahui setiap tindakan yang bisa mengantarkan pada kebahagiaan. Kriteria ini adalah syarat paling pertama

Komentar Walzer dan Fakhry

63

- Dalam menjelaskan karakteristik kota utama dan kriteria pemimpinnya, al-Farabi tidak menunjuk satu kota tertentu sebagai model. Ia hanya menguraikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sebagai kota utama.
- Menurut Walzer, hal yang juga patut digarisbawahi dari pandangan al-Farabi ini adalah bahwa semua kriteria yang disebutkan di atas sepenuhnya bersifat universal. Bahkan pada level tertentu ia cenderung menghindari istilah-istilah Islam dalam kriteria ini.
- Menurut Fakhry, konsep negara ideal al-Farabi ini banyak dipengaruhi oleh pandangan Platon tentang filsuf-raja (*philosopher-king*). Konsep ini diminati karena memiliki kesesuaian dengan konsep pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang Imam, yang dalam arti tertentu adalah Nabi dan para penggantinya. Kualifikasi pemimpin pertama menurut Platon memiliki kesamaan dengan kualifikasi yang diharapkan dalam Islam

Al-Ahkam Al-Sulthaniya Karya Al-Mawardi

64

Al-Mawardi dan Al-Ahkam

65

- Abu al-Hasan al-Mawardi (974-1058 M/364-450 H) adalah seorang ahli hukum terkenal di kalangan Sunni.
- Al-Mawardi bukanlah seorang filsuf. Ia lebih dipandang sebagai seorang ahli hukum, khususnya ahli hukum dalam madzhab Syafii.
- Buku Al-Ahkam al-Sulthaniya dipandang sebagai karya klasik yang menjadi referensi bagi banyak sarjana dalam hukum dan pemerintahan Islam.
- Isi buku ini menjadi standar teori pemerintahan Islam di kalangan Sunni.
- Pemahaman dalam buku ini merupakan upaya rekonsiliasi antara hukum Islam, doktrin Asy'ari dan realitas politik di Dinasti Buyids.

Pentingnya Negara dalam menjaga tatanan

66

- Jika memang tujuan penulis seperti itu maka bisa dipahami bahwa karya ini merupakan upaya untuk menjaga persatuan umat Islam di masa yang sulit.
- Dalam pandangan Al-Mawardi, kekhalifahan adalah bentuk pemerintahan ideal untuk menjaga dan mengimplementasikan hukum-hukum syariah

Khalifah sebagai Simbol Tertinggi

67

- Dalam pandangannya, kekhalifahan atau seorang khalifah lebih dipahami hanya sebagai simbol yang merepresentasikan sistem politik-religius secara keseluruhan yang menata kehidupan kaum muslim hingga yang paling detail.
- Karenanya ketika imam atau khalifah sudah ditetapkan maka seluruh tatanan pemerintahan, konstitusi dan sistem hukum diderivasi darinya.
- Kekuasaan perdana menteri, para menteri, panglima perang, gubernur, hakim, hingga para imam berasal dari kedaulatan Sang Khalifah

- Di dalam al-Ahkam al-Sulthaniyya, ada 20 bab bahasan.
- Bab Pertama terkait dengan kontrak bagi seorang imam. Wafaa menerjemahkan sebagai penunjukkan seorang imam (the appointment of the Imam).
- Imam adalah pengganti kenabian dalam menjaga agama dan pengurusan dunia (siyasat al-dunya).
- Keberadaannya diyakini secara konsensus sebagai sebuah keharusan (wajib). Namun para ulama berbeda pendapat apakah kewajiban itu karena pertimbangan akal atau syariat.

- Kedua tentang penentuan para pembantu (wizarah/ministerial).
- Ada dua jenis pembantu di sini. Pertama pembantu dalam peran memberikan pandangan dan ijtihadnya (tafwidh). Konsep ministerial semacam ini diilustrasikan seperti kepemimpinan Musa yang dibantu oleh Harun.
- Jenis wazir kedua adalah wazir eksekutif (tanfidz). Menurut al-Mawardi, wazir jenis kedua ini lebih rendah dan syaratnya juga lebih sedikit. Wazir jenis ini lebih berperan sebagai perantara antara imam dan rakyat. Tugasnya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan apa yang sudah dijadikan hukum

Bab ketiga dan Keempat

70

- Bab ketiga tentang penentuan gubernur. Para gubernur ini diangkat oleh khalifah. Tugas mereka adalah membantu kerja khalifah di daerah yang jauh untuk mengurus urusan pajak, distribusi kemaslahatan, menjaga negara dan juga urusan agama. (35-41A)
- Bab keempat tentang penentuan pemimpin jihad (komandan perang/war commander). Tugasnya adalah untuk memimpin tentara dan mengatur peperangan. Termasuk di dalamnya soal pengaturan ghanimah hasil perang. 43

Bab kelima dan keenam

71

- Bab kelima adalah tentang penentuan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan umum (al-mashalih). Menurut al-Mawardi, selain memerangi orang musyrik ada tiga perang yang juga dibenarkan, yakni memerangi orang murtad, memerangi para pemberontak, memerangi orang yang menyerang kita atau para pembegal.
- Bab keenam adalah tentang penentuan para hakim. Ada beberapa syarat menjadi hakim menurut al-Mawardi. Pertama, laki-laki, kedua cerdas, ketiga merdeka, keempat islam, kelima adil, keenam memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang baik, ketujuh memiliki pengetahuan mengenai hukum syariat secara baik.

Bab ketujuh dan kedelapan

72

- Bab ketujuh tentang tugas mengurus daerah konflik atau kekerasan. Orang yang bertugas di daerah ini harus melakukan persuasi kepada pihak-pihak yang bertikai dengan cara yang baik dan bermartabat. Pihak-pihak yang bertikai juga harus menerima penyelesaian secara adil dan mau mengakhiri perselisihan. Menurut al-Mawardi, petugas yang bertugas di daerah ini haruslah orang yang mulia, otoritatif, gigih, jujur, tidak serakah, dan saleh.
- Bab kedelapan tentang pengurusan jaringan nasab/garis keturunan. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memastikan bahwa orang dari garis keturunan lebih mulia tidak dipimpin oleh orang dari garis keturunan lebih rendah. Para pejabat yang memahami ini akan memberikan perhatian pada kesejahteraan kelompok ini dan kebijakannya juga akan lebih dipatuhi

- Bab kesembilan tentang pengurusan imam sholat, baik sholat wajib, sholat jumat maupun sholat Sunnah.
- Bab kesepuluh tentang pengurusan hajji, baik dalam proses perjalanan maupun pelaksanaan ibadahnya.
- Bab kesebelas tentang pengurusan sedekah.
- Bab keduabelas tentang pembagian fay' dan ghanimah.
- Bab ketigabelas tentang pengurusan jizyah dan pajak tanah (kharraj).
- Bab keempat belas tentang hukum yang berbeda untuk wilayah yang berbeda. Dalam hal ini ada tiga kategori negeri Islam, yakni kota haram, hijaz, dan di luar keduanya.

- Bab kelimabelas mengenai pengurusan untuk menghidupkan tanah yang mati (yang tidak dikelola atau tidak dibajak) dan pengurusan penyediaan air.
- Dalam bab ini Al-Mawardi memberikan perhatian pada soal pengembangan lingkungan tempat hidup masyarakat dengan penanaman tanah yang belum dikelola dan juga penyediaan airnya.
- Bab keenam belas tentang mempertahankan tanah untuk tidak ditanami agar tetap bisa menjadi ladang rumput dan bisa menjadi tempat hewan-hewan makan di lapangan itu. Bab ini juga membahas soal pengurusan fasilitas-fasilitas publik seperti pasar dan jalan.

- Bab ketujuh belas, sultan bisa memberikan konsesi tanah sejauh tanah itu tidak ada pemiliknya (individual), atau tidak ada pihak yang mengambil manfaat darinya (mustahiq). Ada dua macam konsesi di sini, yakni konsesi tamlik (memberikan kepemilikan), dan konsesi istighlal (hanya mengambil hasilnya).
- Bab kedelapan belas tentang badan yang bertugas menjaga property, asset dan pendapatan negara. Badan ini semacam badan pengarsipan atau pencatat.
- Bab kesembilan belas tentang tindakan kriminal dan hukumannya.
- Bab kedua puluh tentang petugas yang bertanggung jawab melaksanakan amar ma'ruf nahy munkar.

Ibn Taimiyah (1263-1328)

76

Al-siyasah al-syar'iyah

77

- Ringkasan ini diambil dari karya Ibn Taimiyah yang berjudul Al-Siyasah Al-Syar'iyah
- Ia membagi buku itu menjadi dua bab. Pertama bab tentang Amanah dan Bab kedua tentang hukum dan hak.
- Pada bab pertama dibagi menjadi dua bagian, tentang kepengurusan (al-wilayat) dan harta-harta (al-amwal)
- Pada bab kedua juga dibagi dua: tentang hukum dan hak Allah dan hukum dan hak manusia

السِّيَاسَةُ
الشَّرْعِيَّةُ
فِي إِصْلَاحِ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ
شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ

تَحْقِيقُ
السَّيِّدِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ
السَّيِّدِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ

الفهرس

٥	ترجمة المؤلف
١١	مقدمة المؤلف

الباب الأول الامانة

١٩	القسم الأول : الولايات
١٧	١ - تولية الأصلح
٢١	٢ - اختيار الأمثل
٢٣	٣ - الأصلح في كل ولاية بحسبها
٢٧	٤ - معرفة الأصلح
٣١	القسم الثاني : الأموال
٣١	١ - ما يدخل تحت هذا القسم
٣٤	٢ - الأموال السلطانية
٣٤	(أ) الغنيمة
٣٧	(ب) الصدقات
٣٨	(ج) الفيء
٤٠	٣ - ظلم الولاية والرعية
٤٥	٤ - المصارف

الباب الثاني

القسم الأول : حدود الله

١ - التعريف بحدود الله

٢ - عقوبة المحاربين

٣ - قتال المحاربين

٤ - حد السرقة

٥ - حد الزاني

٦ - حد الشرب

٧ - حد القذف

٨ - التعزير

٩ - الجهاد

القسم الثاني : حقوق الناس

١ - حد القتل

٢ - القصاص في الجراح

٣ - القصاص في الأعراض

٤ - عقوبة الفرية

٥ - حقوق الزوج والزوجة

٦ - المعاملات

خاتمة

١ - الشورى

٢ - أهمية الولاية

الفهرس

Memilih pengurus/wali

81

- Dalam menjelaskan soal kepengurusan, hal pertama yang ia tekankan adalah soal bagaimana cara memilih pengurus/wali.
- Kita harus memilih yang paling memberikan maslahat untuk tujuan yang hendak dicapai (*tawliyat al-aslah*). Dalam memilih pemimpin, pertimbangan utama adalah mencari yang paling baik (*al-ashlah*).
- Ia mengutip sebuah hadits riwayat al-Hakim, “barang siapa yang mengangkat seseorang (laki-laki) sebagai pemimpin, padahal dia mendapatkan orang yang lebih baik, maka sesungguhnya ia telah berkhianat pada Allah.
- Dalam hal ini ia memahami yang paling baik sebagai yang paling mampu.

Menolak nepotisme

82

- Ia juga menolak pertimbangan kecintaan dan kekerabatan dalam memilih pemimpin.
- Ia mengutip perkataan Umar:
- Barang siapa yang mengangkat pemimpin karena rasa cinta (mawaddah) dan kedekatan (qarabah), maka ia telah mengkhianati Allah.
- Dengan pandangan di atas, kepemimpinan diberikan kepada yang terbaik, bukan kepada yang menuntut atau mengejar.

Prinsip profesionalitas dan kompetensi

83

- Hal yang ditekankan dalam memilih pengurus adalah professional dan mampu untuk pekerjaan dimaksud.
- Ia mengecam mereka yang memilih pengurus berdasarkan rasa cinta atau kekerabatan atau yang secara populer disebut nepotisme.
- Prinsip ini juga ditegaskan dalam sub *ikhtiyar al-amtsal fa al-amtsal*.
- Karakter pemimpin yang dicari harus sesuai dengan pekerjaan yang akan diemban. Jika yang dibutuhkan adalah tugas kepercayaan, seperti menyimpan uang, maka pemimpin (pengurus) yang dicari haruslah yang amanah. Dan jika tugas yang diemban adalah memungut dan menyimpan uang, maka yang dicari adalah yang kuat dan yang amanah.

- Untuk tugas kehakiman, hendaknya dicari yang berilmu dan wara’.
- Namun jika yang dominan itu salah satu, maka perlu dilihat perkara yang hendak diputuskan. Jika masalahnya cukup jelas hukumnya, maka sebaiknya dipilih yang wara’. Namun jika perkaranya sulit sehingga membutuhkan ketelitian, maka diutamakan yang lebih berilmu.

Tentang harta

85

- Bagian kedua yang dibahas dalam bab pertama adalah soal harta. Hal yang ditekankan dalam bagian ini adalah soal keharusan menyampaikan/memberikan harta kepada yang berhak.
- Ada beberapa jenis harta yang menjadi hak pemerintah: ghanimah (harta rampasan), sedekah, dan fay' (sitaan).

Harta negara

86

- Ghanimah adalah harta yang didapat dari hasil pertempuran dengan kaum kafir.
- Sedekah dan zakat adalah harta yang diberikan kepada para mustahiq yang ada dalam Al-Quran
- Sementara yang termasuk harta fai cukup banyak. Di antaranya adalah harta yang diperoleh dari orang kafir tanpa proses perang. Pajak yang diambil dari orang kafir juga masuk kategori fai. Cukai perdagangan juga masuk kategori fai. Harta orang yang meninggal namun tidak memiliki ahli waris.

Hukum dan hak allah

87

- Sementara pada bagian hukum dan hak, Ibn Taimiyah membaginya menjadi dua, yang pertama tentang hukum dan hak Allah dan yang kedua tentang hak-hak manusia.
- Yang dimaksud dengan hukum dan hak-hak Allah adalah hukum yang tidak terkait dengan urusan orang tertentu, namun itu menjadi kebutuhan semua orang (tentang pidana)
- Jika melihat sub-sub yang ada pada bagian ini, hal yang ingin ditekankan oleh Ibn Taimiyah adalah soal keamanan umum.

- Misalnya tentang keamanan di jalan dari para perampok, tentang pencurian dan kewajiban berjihad/berperang.
- Namun pada bagian ini ia juga memasukkan masalah hukum perzinahan dan minum khamar. Karenanya kita tidak bisa menyebut bagian hukum dan hak Allah sebagai masalah pidana dalam konteks modern. Ia memahaminya hanya sebagai hukum umum yang tidak terkait dengan orang tertentu.

Hak dan hukum manusia

89

- Sementara yang dimaksud dengan hak-hak manusia adalah hukum yang terkait dengan orang tertentu.
- Misalnya masalah pembunuhan dan qisas. Pada bagian qisas ia membagi dua, qisas karena melukai tubuh.
- Misalnya melukai tangan, maka harus diqisas dengan setimpal. Yang kedua adalah qisas yang melukai martabat dan harga diri. Inipun harus diqisas dengan setimpal, namun jika si korban memaafkan, itu jauh lebih baik.
- Pada bagian ini juga dibahas tentang hak suami-istri dan masalah muamalah.

Filsafat Politik Hobbes: Negara sebagai Leviathan

90

Thomas Hobbes (1588-1679)

91



Karya Pertama

92

- Thomas Hobbes adalah salah satu filsuf politik yang telah memberikan sumbangan besar mengenai masyarakat dan negara lewat beberapa karya pentingnya.
- Pada tahun 1629, ia meluncurkan karya politiknya yang pertama dengan judul *a forty-one-years-old classical scholar in search a new understanding of man and government*. Karya pertamanya ini masih sangat dipengaruhi pandangan Francis Bacon yang terkenal dengan metode empiris-induktifnya.

Inspirasi dari Galileo

93

- Pandangan dalam karyanya ini mendapat tantangan pada saat ia memahami teori geometri.
- Terlebih setelah ia berjumpa dengan Galileo, seorang fisikawan yang mengubah satu postulat lama bahwa tidak ada yang bergerak sehingga sesuatu yang lain menggerakkannya.
- Galileo membuat postulat baru yang merupakan hal sebaliknya, yakni bahwa segala sesuatu selalu bergerak kecuali bila ada sesuatu yang lain menghentikannya.

Model Pemerintahan/Negara

94

- Pandangan Galileo tentang gerak ini mendorong Thomas Hobbes untuk mengaplikasikan postulat tersebut pada teorinya tentang manusia dan negara. Ia menyusun obsesinya tersebut dengan menjelaskan gerak manusia dengan manusia yang lain dan kemudian mendeduksikan pemerintahan macam apa yang dapat memelihara dan memaksimalkan gerak tersebut.
- Obsesinya mulai terwujud pada saat karya berbahasa Latin-nya, *De Cive*, diterbitkan pada 1641. Sepuluh tahun kemudian, 1651, karyanya yang berbahasa Inggris, *Leviathan* menyusul dan sebelumnya, pada tahun yang sama, terjemahan *De Cive* dalam bahasa Inggris yang ia beri judul *Philosophical Rudiment Concerning Government and Society* juga telah diterbitkan.

Tentang Leviathan

95

- Leviathan adalah sebuah karya yang secara komprehensif menguraikan bagaimana awal kelahiran sebuah negara.
- Leviathan, demikian kita menyebut negara, tak lain adalah manusia buatan. Dengan kekuatannya yang melampaui alam, ia diharapkan dapat memberi perlindungan dan pertahanan bagi masyarakat.

Isi Leviathan

96

- Pada Leviathan terdapat kedaulatan yang menjadi jiwanya, yang dengannya ia memberi kehidupan dan gerak bagi seluruh tubuhnya.
- Para hakim dan aparat hukum menjadi anggota badannya.
- Ganjaran dan hukuman menjadi syarafnya. Kemakmuran dan kekayaan menjadi kekuatannya.
- Keamanan masyarakat menjadi bisnisnya.
- Para penasihat yang memberikan petunjuk kepada mereka yang ingin tahu menjadi memorinya (ingatan).

- Keadilan dan hukum menjadi rasio dan kehendaknya. Kerukunan adalah suatu kesehatan, adanya penghasutan serta kerusuhan menjadi masa sakitnya dan perang sipil menjadi kematiannya.
- Dan terakhir, perjanjian atau kontrak yang menyatukan badan-badan politik tadi sama seperti firman Tuhan saat mencipta: *Terjadilah atau mari kita menciptakan manusia.* (Thomas Hobbes, 1974:81-82).

Asumsi Antropologis

98

- Untuk memahami terbentuknya negara, menurut Hobbes, terlebih dahulu kita harus memahami manusia yang menciptakan sang Leviathan tersebut serta bagaimana dan dengan apa perjanjian dibuat.
- Manusia dalam pandangan Hobbes harus dipahami secara mekanistik. Segala perilakunya merupakan dorongan dari satu naluri, yakni ketakutan terhadap kematian yang keji.

Tiga Hal Alamiah

99

- Ada tiga hal alamiah yang menjadi situasi pra-negara. Tiga hal alamiah itu adalah, keadaan alamiah (*state of nature*), hak alamiah (*right of nature*) dan hukum alamiah (*law of nature*).
- Kita tak perlu melihat ketiga hal alamiah ini secara kronologis, cukuplah diasumsikan bahwa pada situasi pra-negara terdapat tiga hal alamiah ini.

Kondisi Perang sebagai *State of Nature*

100

- Keadaan alamiah (*state of nature*) adalah satu situasi di mana manusia berada dalam kondisi purba sebagai manusia. Menurut Hobbes, keadaan manusia secara alamiah ada dalam situasi perang semua melawan semua (*bellum omnium contra omnes*).
- Dengan kata lain *state of nature* manusia menurut Hobbes adalah *state of war* atau situasi perang. Keadaan manusia yang perang semua melawan semua, menurut Hobbes, dikarenakan kesamaan kodrat manusia secara keseluruhan, baik kemampuan fisik maupun kecerdasannya.

Penyebab Perselisihan

101

- Menurut Hobbes, ada tiga sebab yang membuat manusia selalu berselisih. *Pertama*, karena kompetisi, *kedua*, karena pertahanan dan *ketiga*, karena kehormatan.
- Penyebab yang pertama dimungkinkan karena kesamaan harapan untuk memperoleh sesuatu. Ketika salah satu pihak telah memperoleh harapannya maka pihak lain akan berusaha merebut dengan cara membunuh pemiliknya.
- Penyebab kedua diandaikan oleh kepemilikan akan sesuatu sehingga ia perlu mempertahankan nyawa dan harta dengan cara apapun.

- Sementara penyebab ketiga terjadi karena masalah pelecehan kehormatan bahkan mungkin karena persoalan sepele. Sebab-sebab ini dapat dengan mudah memicu terjadinya perselisihan antar individu maupun kelompok, karena dalam keadaan alamiah manusia memiliki hak kebebasan untuk melakukan apa saja.

Keinginan untuk Keluar dari Kondisi Alamiah

103

- Dalam situasi seperti ini, orang lain selalu dianggap berbahaya dan mengancam hidupnya. Dengan demikian setiap saat selalu ada dalam situasi yang mengancam hidup semua orang. Semua manusia adalah serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*).
- Keadaan yang tak menentu ini membuat orang berpikir dan mengupayakan suatu kekuatan yang dapat melindunginya dari keadaan alamiah.

Kebebasan sebagai Hak Alamiah

104

- Keadaan alamiah manusia Hobbes yang selalu dalam perang semua melawan semua diandaikan oleh adanya hak alamiah manusia. Menurut Hobbes, yang dimaksud hak alamiah adalah kebebasan alamiah. Kebebasan dipahami sebagai tidak adanya halangan atau rintangan dari luar.
- Dengan kebebasan alamiah ini, manusia berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkannya, termasuk merampas nyawa dan hak milik orang lain. Hak ini memungkinkan sebuah situasi yang kacau-balau dan hidup yang selalu terancam.

Hak Alamiah

- Hak alamiah, seperti yang sudah disinggung di atas, adalah kebebasan yang dimiliki setiap manusia untuk menggunakan kekuasaannya sebagaimana yang ia inginkan demi menjaga diri dari keadaan alamiah. Dan kebebasan dipahami sebagai tidak adanya rintangan dari luar. (Ibid:189. Bag.I.,Bab. XIV).
- Hak alamiah ini, oleh Hobbes dipahami sebagai kebebasan untuk mengupayakan terciptanya perdamaian dengan cara apapun. Namun, hak ini juga dapat dipahami sebagai hak yang memungkinkan terciptanya keadaan alamiah, keadaan perang semua melawan semua.
- Dengan kebebasan alamiahnya, semua orang berhak untuk melakukan apa saja, baik hak untuk menciptakan perdamaian maupun hak untuk membuat kerusuhan. Karena kealamiahannya itu, ia dapat ditafsirkan untuk tujuan yang paling berlawanan sekalipun.

- Sementara hukum alamiah (*lex naturalis*) adalah hukum yang didapat melalui rasio manusia. Hukum ini memiliki semangat pencegahan segala hal yang dapat merusak kehidupan manusia.
- Perbedaan antara hak alamiah dan hukum alamiah sama seperti perbedaan antara kebebasan dan kewajiban.
- Karena kebebasan merupakan esensi dari hak alamiah dan kewajiban dari hukum alamiah. Hukum alamiah ini berbunyi bahwa setiap orang harus mengupayakan terciptanya perdamaian sejauh ada harapan untuk mendapatkannya.

- Jika ia tidak mendapatkannya, ia berhak untuk menggunakan segala sarana atau bantuan yang ada. Keharusan untuk selalu mengupayakan terciptanya perdamaian ini adalah hukum alamiah pertama. Dan izin untuk menggunakan semua sarana yang ada bila perdamaian terhambat adalah ringkasan dari hak alamiah.
- Hukum alamiah kedua adalah konsekuensi logis dari hukum alamiah pertama. Wujud nyata dari upaya menciptakan perdamaian adalah meletakkan hak atas segala sesuatu. Tanpa kewajiban untuk meletakkan hak atas segala sesuatu ini, hukum alamiah pertama menjadi mandul.

Penegakan Hukum Alamiah Kedua

108

- Agar jangan sampai situasi konflik kembali pecah maka hukum alamiah kedua ini harus segera diwujudkan. Peletakan hak atas segala sesuatu juga harus diikuti oleh pihak lawan, karena bila hanya satu pihak maka pihak ini menjadi terancam oleh pihak lain yang tidak menyerahkan hak alamiahnya.
- Dari semua hak yang diberikan, hanya hak untuk hidup yang tidak dapat diletakkan karena penyerahan hak alamiah itu justru demi menjamin hak hidup. Upaya perdamaian sendiri, menurut Hobbes, didorong oleh rasa takut akan kematian.

Perjanjian/Kontrak

109

- Pada tahap peletakan hak atas segala sesuatu ini, semua orang dengan semua orang melakukan semacam janji untuk tidak menyerang satu sama lain sebagai wujud nyata dari upaya menjaga situasi damai.
- Perjanjian inilah yang disebut kontrak. Menurut Hobbes, kontrak adalah saling mengalihkan atau memindahkan hak secara timbal-balik. Semua orang harus menaati kontrak yang telah disahkan ini. Keharusan ini menjadi hukum alamiah yang ketiga menurut Hobbes.
- Ada sekitar sembilanbelas hukum alamiah yang disodorkan oleh Hobbes yang inti dari semua hukum alamiah itu adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan kontrak yang sudah dibuat agar jangan kembali jatuh pada situasi alamiah manusia.

Fase Kontrak

110

- Walaupun kontrak sudah dicipta di mana semua orang sudah mengikat janji untuk selalu menjaga situasi damai yang tengah berlangsung, namun siapa yang menjamin bahwa semua orang tidak akan berkhianat.
- Kekuatan kontrak itu hanya ada pada pertimbangan rasional untuk menjaga kehidupan dari kerusakan dalam *state of nature*. Itu artinya ketika salah satu pihak mengabaikan kontrak tersebut dengan cara mengambil haknya kembali maka pihak lain juga akan membalas. Maka situasi akan kembali pada *state of nature*.

Perlunya Pihak Ketiga

111

- Dengan demikian, bila modal perdamaian ini hanya berdasarkan kontrak antar masing-masing pihak, situasinya menjadi rentan untuk kembali pada situasi alamiah.
- Atas pertimbangan ini, diperlukan satu kekuatan ketiga yang dapat menjaga kontrak antara masing-masing kelompok. Pihak ketiga ini memiliki hak untuk menghukum mereka yang melanggar perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat.

- Semua orang harus mengatakan kepada semua orang : “*saya serahkan hak pengaturan atas diri saya pada orang ini atau kelompok ini (yang menjadi pihak ketiga), dan kamu juga harus menyerahkan hakmu kepadanya.*” (Ibid: 227, Bag. II, Bab. XVII).
- Penyerahan hak ini didasari pada pertimbangan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan yang lebih massif.
- Pihak ketiga (orang atau kelompok) yang menerima kesepakatan antar semua orang ini juga disertai otoritas penuh untuk menghukum mereka yang melanggar kesepakatan. Otoritas tersebut ditujukan untuk tujuan utama, yakni menjaga kedamaian dan keamanan.

Lahirnya Leviathan

113

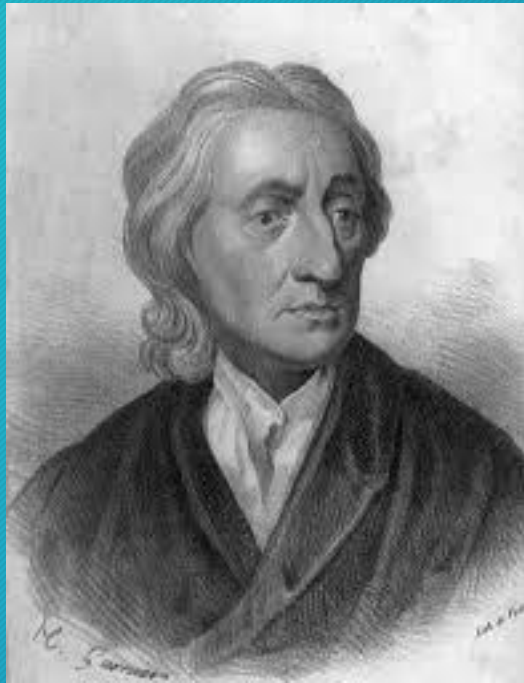
- Otoritas yang telah diberikan kepada orang tersebut tidak dapat ditarik kembali. Karena ketika otoritas sudah diterima secara sah, seseorang atau kelompok yang hendak mengambil kembali akan dianggap membangkang terhadap negara dan layak menerima hukuman.
- Lembaga yang menerima kesepakatan ini, oleh Hobbes disebut sebagai negara (*common-wealth*) atau civitas dalam bahasa latin. Karena kekuasaannya yang sangat berdaulat dan tidak bisa dicabut kembali, ia disebut sebagai Leviathan atau tuhan yang dapat mati.

John Locke

114

John Locke (1632-1704)

115



Membentuk Pemerintahan Sipil

116

- Disarikan dari:
- John Locke, *Two Treatises of Government*
- dan karya McClelland, “A History of Western Political Thought”

Tentang “two treatise on civil government” Locke

117

- Karya Locke yang berjudul *Two Treatises of Government* yang terbit pada tahun 1690 dibagi menjadi dua.
- Buku yang pertama banyak membahas kedaulatan Tuhan yang direpresentasikan oleh wakilnya di bumi.
- Buku pertama (*the First Treatise*), *The False Principles and Foundation of Sir Robert Filmer*, merupakan kritik atas Robert Filmer yang menulis buku *Patriarchia or the Natural Power of Kings* (1680).

Asumsi Robert Filmer

118

- Filmer berangkat dari asumsi umum bahwa manusia harus tunduk pada kedaulatan Tuhan.
- Kedaulatan Tuhan di muka bumi diwakilkan pada orang yang ia pilih yang ia sampaikan melalui wahyu.
- Para wakil Tuhan ini bisa jadi seorang nabi atau seorang raja.

Kritik Locke atas Filmer

119

- Locke menolak konsep kedaulatan Tuhan yang dianugerahi kepada seorang penguasa di bumi.
- Lantas jika ia menolak kedaulatan macam itu, kedaulatan macam apakah yang ia kehendaki.
- Sebagaimana Hobbes, Locke mengidealkan sebuah kedaulatan yang lahir dari persetujuan bebas dari warga.

Second Treatise

120

- Argumentasi ini ia uraikan dalam Buku kedua (second Treatise) yang berjudul *An Essay Concerning The True Original, Extent and End of Civil Government*.
- Melalui buku ini, Locke menegaskan bahwa semua orang, termasuk mereka yang ada dalam pemerintahan (*sovereign*), haruslah tunduk pada hukum yang dibuat.

Argumen Dasar dalam Second Treatise

121

- Sebagaimana Hobbes, Locke juga menjelaskan teorinya dalam kerangka pra-negara (kondisi alamiah/*state of nature*) dan negara.
- State of nature* menurut Locke adalah situasi bebas (*state of liberty*).
- Namun keadaan alamiah manusia ini diikat oleh satu hukum alamiah untuk mengakui hak alamiah (*right of nature*) orang lain.
- Postulat dasar inilah yang akan membentuk kerangka argumen dari buku kedua.

Konsep Kondisi Alamiah Locke

122

- Dalam uraian mengenai *state of nature*, Locke menegaskan dua keadaan dasar umat manusia yang harus diakui: pertama adalah situasi bebas (*a state of perfect freedom*) dan situasi kesetaraan (*a state of equality*).
- Dengan situasi pertama, Locke menegaskan bahwa manusia bebas untuk mengatur tindakan dan hak miliknya. Sementara dengan situasi yang kedua, tidak ada manusia yang lebih daripada manusia yang lain.

Konsep Hukum Alamiah Locke

123

- Menurut Locke, situasi alamiah ini harus diatur dan dipandu oleh apa yang ia sebut sebagai hukum alamiah (*law of nature*).
- Rasio yang menjadi hukum alamiah menegaskan kepada seluruh umat manusia bahwa manusia itu setara dan bebas, tidak ada satu manusia pun yang diizinkan untuk melukai hidup, kebebasan, kesehatan dan hak milik orang lain.

- Bahkan hukum alamiah ini juga tidak membolehkan seseorang melukai hidupnya sendiri.
- Aturan ini berakar dari asumsi bahwa keadaan alamiah umat manusia adalah pemberian Tuhan yang tidak boleh dilukai dan dikurangi, bahkan oleh dirinya sendiri.

Tiga Hak Alamiah paling Dasar

125

- Tiga hak alamiah yang paling substantif menurut Locke adalah hak untuk hidup, kebebasan dan hak milik (*property*).
- Tuhan telah memberi kehidupan kepada umat manusia dan karenanya tidak ada satu manusia pun yang memiliki hak untuk membunuh manusia yang lain (kecuali untuk mempertahankan diri dan dalam situasi perang).

Raison d'être Negara menurut Locke

126

- Semua orang, menurut Locke sebagaimana yang dituntut oleh hukum alamiah, tidak diizinkan untuk menginvasi hak orang lain. Hukum alamiah ini didesain untuk menciptakan keadaan damai dan menjaga umat manusia. Setiap orang yang ada dalam *state of nature* memiliki hak untuk menghukum mereka yang melanggar hukum alamiah (Locke, Chapter II, § 7, hal 289-90).
- Keadaan di mana setiap orang boleh melakukan eksekusi hukum terhadap mereka yang melanggar hukum alamiah, menurut Locke, pada akhirnya meniscayakan (membutuhkan) satu insitusi yang memiliki kekuasaan atas manusia yang lain, namun institusi ini tidak memiliki kekuasaan absolut dan sewenang-wenang.

Memperbaiki dan Mencegah

127

- Paling tidak, menurut Locke, insitusi ini ditugasi untuk melakukan *reparation* dalam arti memperbaiki apa yang tidak baik dan menghukum mereka yang melanggar, dan *restraint*, untuk mencegah terjadinya tindakan yang dianggap melanggar hukum. (Locke, Chapter II, § 8, hal 290)

Lima Gambaran Negara menurut Locke: Gambaran yang Pertama

128

- Menurut McClelland, uraian Locke mengenai kehidupan di dalam *state of nature* melahirkan lima gambaran mengenai negara yang satu sama lain saling terkait.
- Yang pertama, pemerintah atau negara dalam bayangan Locke bertujuan untuk menjaga agar hak-hak alamiah manusia dapat dijaga.
- Namun kiranya, menurut Locke manusia tidak perlu berterimakasih secara berlebihan kepada negara karena pada dasarnya, ada negara atau tidak ada, hak alamiah manusia tetap harus dijaga lewat ketentuan hukum alamiah. Bedanya, dalam *state of nature* manusia harus mengurus dan menjaga sendiri hak alamiahnya, sementara dengan adanya negara, tugas itu dapat diserahkan kepada negara.

Gambaran Kedua

129

- Yang kedua, Locke mencoba membedakan status masyarakat dan negara
- Yang pertama lebih bersifat alamiah sementara yang kedua artifisial.
- Relasi antar-manusia dalam bentuk sistem sosial dan transaksi ekonomi adalah sesuatu yang ada begitu saja seiring dengan adanya manusia.
- Sementara negara adalah sistem atau mekanisme yang diciptakan oleh masyarakat. Karenanya masyarakat dapat menyusun dan mendesain bentuk negara macam apa yang akan mereka lahirkan.

Gambaran Ketiga

130

- Yang ketiga, sebagai sebuah mekanisme, negara dilahirkan dengan tujuan.
- Menurut Locke tujuan dari pembentukan negara adalah untuk menjaga agar hak alamiah umat manusia tetap dihormati dan tidak dilanggar oleh orang lain.
- Karenanya, bagi Locke, jika negara tidak mampu atau tidak lagi menjalankan fungsinya untuk menjaga hak alamiah warganya, maka kehadirannya pun tidak lagi dibutuhkan.

Gambaran Keempat

131

- Yang keempat, hak alamiah yang tidak bisa dipisahkan dari diri setiap orang sejatinya tidak bisa diserahkan kepada negara.
- Warga hanya “meminjamkan” haknya kepada negara untuk kondisi-kondisi tertentu. Bagi Locke, tidak ada manusia yang mau menyerahkan haknya (hak hidup, kebebasan dan hak milik) kepada pihak lain.
- Karenanya yang mungkin dapat dilakukan adalah meminjamkan hak tersebut kepada negara sebagai tanda bahwa negara diberi restu untuk melakukan eksekusi hukum.
- Persetujuan dari warga yang bersifat bebas ini yang kemudian disebut legitimasi.

Gambaran Kelima

132

- Yang kelima, karena masyarakat bersifat alamiah dan negara artifisial maka masyarakat sejatinya mendahului negara.
- Dengan demikian bukan negara yang membentuk manusia, namun manusialah yang membentuk negara.
- Atas dasar ini, menurut Locke, yang menjadi prioritas adalah masyarakat bukan negara.
- Pandangan ini menjadi pijakan bagi paham liberalisme yang diangkat di kemudian hari.

Kontrak Sosial

133

- Apa yang disebut dengan kontrak sosial dalam pemikiran Locke merupakan perluasan dari moral yang sudah ada dalam *state of nature*.
- Apa yang dimaksud dengan moral di sini adalah adanya pengakuan dan keharusan untuk melindungi hak-hak alamiah setiap orang.
- Hak-hak alamiah ini dapat dibuat metafora sebagai modal dasar yang diberikan Tuhan kepada seluruh umat manusia.
- Dengan modal ini, seseorang kemudian melakukan transaksi dengan orang lain dalam bentuk kontrak sosial untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar seperti perlindungan dan kenyamanan.

Konsep Negara Locke

134

- Kesepakatan dasar dalam kontrak itu adalah untuk melindungi hak-hak alamiah yang menjadi modal dasar yang dimiliki setiap manusia.
- Hasil dari kesepakatan bersama itu adalah menciptakan satu institusi pemerintahan yang dipercaya untuk menjalankan kesepakatan dasar tadi.
- Orang-orang yang ada di dalam institusi pemerintah, selain memiliki tugas menjalankan kesepakatan bersama tadi, mereka juga terikat dengan kesepakatan yang dibuat.
- Itu artinya mereka bukan pemilik kekuasaan yang absolut dan dapat bertindak sewenang-wenang.

Kemungkinan Konsep Pembangkangan (*disobidience*)

135

- Bahkan pemerintah ini dapat dijatuhkan jika mereka mengkhianati atau tidak menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak alamiah warga.
- Tindakan penentangan terhadap eksistensi negara yang tidak lagi menjalankan tujuan adanya negara bukan sesuatu yang illegal karena alasan dari adanya negara menurut Locke adalah untuk menjaga dan melindungi hak alamiah warga.

Yang tidak Tergabung dalam Kontrak

136

- Mereka yang tidak bergabung dalam kesepakatan tersebut adalah mereka yang berada dipinggir dari tata politik yang dibuat.
- Jika mereka merusak dan mengancam komunitas warga, maka mereka sah untuk diperangi.
- Sementara mereka yang menarik kembali kesepakatan yang ada dalam kontrak sosial namun tetap berada dan tinggal di tempat itu, penarikan tersebut tidak lantas menanggalkan kewajiban.
- Dengan demikian posisinya seperti orang asing yang berada di dalam masyarakat politik tertentu, ia akan dikenakan kewajiban dan keharusan yang ada di dalam komunitas politik itu

Pemisahan Yudikatif dari Eksekutif

137

- Jika kita membagi alat negara dalam tiga kategori, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif, Locke tampaknya akan menempatkan eksekutif dan legislatif dalam satu tempat.
- Gagasan mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *checks and balances* tidak ada dalam gagasan negara John Locke.
- Namun khusus mengenai institusi kehakiman (yudikatif) Locke sangat menekankan tentang pentingnya sebuah institusi kehakiman yang tidak tergantung pada raja.

Bentuk Pemerintahan

138

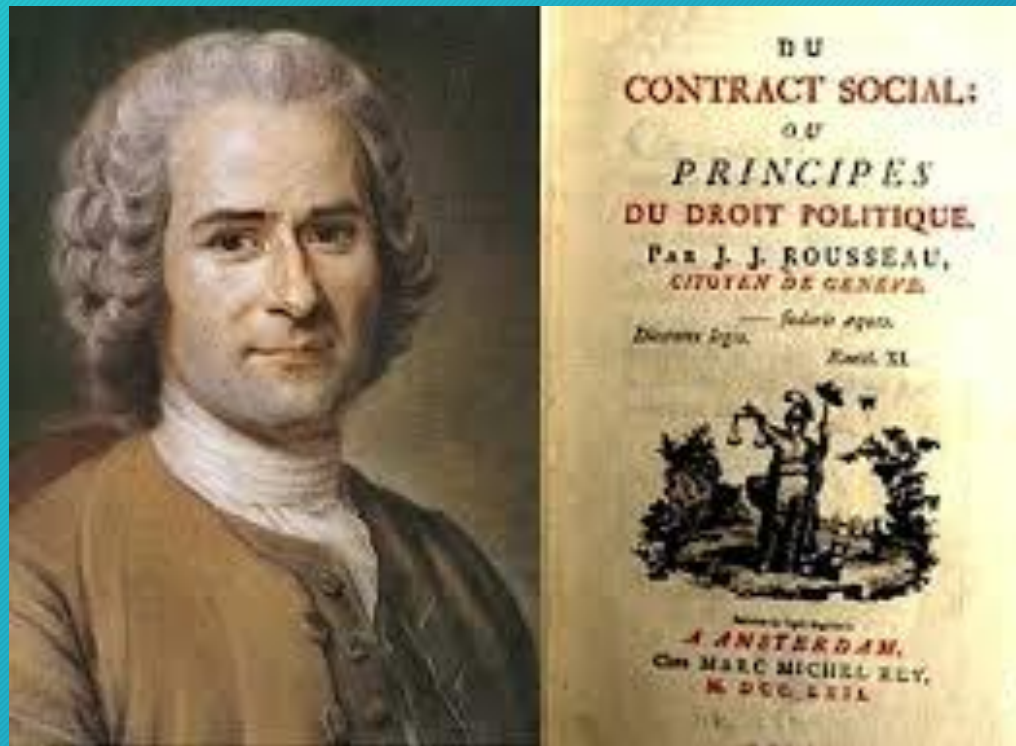
- Mengenai bentuk pemerintahan, bagi Locke, apapun bentuk pemerintahan yang ada, ia akan dianggap memiliki legitimasi jika menjalankan fungsi dasar untuk melindungi dan menjaga hak-hak alamiah warga, terlebih hak atas *property*

Jean-Jacques Rousseau

139

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

140



Rousseau dan Kontrak Sosial

141

- Rousseau juga dikenal sebagai peletak dasar teori kontrak sosial sebagaimana Hobbes dan Locke.
- Hanya saja pandangannya mengenai *state of nature* berbeda dengan Hobbes dan Locke.
- Menurut Rousseau, dalam *state of nature* kondisi manusia ada dalam ketidaksetaraan namun kondisi ini tidak membuat seseorang mendominasi orang lain.
- Meski berada dalam kondisi tidak setara, di fase ini motivasi untuk mendominasi tidak terlalu kuat.

Ketidaksetaraan dan Munculnya Masyarakat

142

- Motivasi untuk mendominasi hanya mungkin terjadi jika ketidaksetaraan dianggap sebagai masalah dalam masyarakat.
- Dalam pandangan Rousseau, ketidaksetaraan mulai muncul menjadi masalah seiring lahirnya ide mengenai masyarakat.
- Kapan masyarakat muncul? Rousseau tidak mengetahuinya secara pasti. Di dalam buku *the Social Contract* dia mengatakan tidak mengetahui kapan masyarakat muncul.

- Namun dalam *Discourse* dia memiliki satu dugaan. Katanya, ketika ada orang yang mengklaim sebidang tanah sebagai miliknya dan kemudian ada orang lain yang mengakui klaimnya itu dapat dianggap sebagai awal terbentuknya ide mengenai masyarakat.
- Dalam pandangan Rousseau, ide mengenai masyarakat terkait dengan ide mengenai kepemilikan.
- Konsep kepemilikan telah mengubah relasi antar-manusia sehingga menjadikan ketidaksetaraan sebagai masalah.
- Di dalam kondisi alamiah, menurut Rousseau, hal itu tidak terjadi.

Kebebasan dan Kehendak Umum

144

- Dalam pengantar *The Social Contract*, Rousseau melukiskan tujuan dari buku tersebut.
- Melalui *the Social Contract*, ia mencoba mencari apakah dengan kondisi manusia sebagaimana adanya dan hukum yang mungkin dapat dibuat, mereka mampu menciptakan satu aturan sipil yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dalam investigasinya untuk menjawab tujuan itu, Rousseau berupaya merekonsiliasi dua hal yang ia anggap saling bersitegang, yakni antara hak dan kepentingan.

Kehendak Umum/Volonte Generale

145

- Menurut Rousseau, setiap orang pada umumnya selalu didorong oleh kepentingan diri.
- Namun upaya untuk selalu memenuhi kepentingan diri tidak jarang bertabrakan dengan hak yang dimiliki oleh pihak/orang lain.
- Bagaimana hal ini dapat didamaikan? Rousseau memiliki keyakinan bahwa hal ini dapat dipecahkan melalui apa yang ia sebut sebagai kehendak umum (*general will/volonte generale*).
- Pada umumnya masyarakat selalu digerakkan oleh kehendak tunggal (*single will*). Masyarakat yang hanya digerakkan oleh kehendak tunggal cenderung berbenturan dengan hak pihak lain.

Kebebasan vs hukum

146

- Kehendak untuk selalu menuruti seluruh kepentingan diri yang disinggung Rousseau terkait dengan ide kebebasan dalam pandangan Hobbes.
- Dalam *Leviathan*, Hobbes mengatakan bahwa kebebasan dipahami sebagai ketiadaan rintangan.
- Kebebasan bagi Hobbes merupakan esensi dari hak alamiah.
- Hukum yang berisi kewajiban bertolak belakang dengan kepentingan kebebasan.

Kebebasan di Fase Kontrak

147

- Menurut Rousseau, kebebasan di dalam kondisi alamiah memang kebebasan yang ideal, namun kita tidak akan pernah bisa kembali pada ke masa itu.
- Di dalam fase kontrak kita harus menghentikan imajinasi tentang kebebasan alamiah.
- Rousseau menyebut kebebasan yang ada dalam fase alamiah sebagai kebebasan yang digerakkan oleh kehendak tunggal. Di dalam fase kontrak kita tidak lagi bergerak atas dasar kehendak tunggal.

As free “as before”

148

- Namun begitu, hal yang perlu kita pastikan di dalam fase kontrak adalah bagaimana kebebasan bisa diraih sebagaimana kebebasan yang ada sebelumnya (*as free ‘as before’*).
- Inilah proyek paradoks Rousseau mengenai kebebasan di fase kontrak: di satu sisi ia mengatakan bahwa kebebasan di dalam fase kontrak berbeda dengan kebebasan di fase *state of nature*, namun di sisi yang lain ia juga mengupayakan sebuah kebebasan sebagaimana yang ada dalam fase *state of nature*.

Mengikat Kontrak dalam Kehendak Umum

149

- Untuk menjawab proyeknya itu, Rousseau terlebih dahulu menjelaskan fase kontrak di mana setiap orang menyerahkan diri dan kekuasaannya ke dalam kendali kehendak umum (*general will*). Penegasan itu dapat dilihat dalam buku I, bab VI:
- “Setiap (semua, Pen.) dari kita meletakkan diri dan seluruh kekuasaan yang ada di dalamnya di bawah aturan utama dalam kehendak umum, dan dalam kapasitas diri kita, kita menerima setiap kelompok sebagai bagian yang tak terbagi dari keseluruhan.”

Terbentuknya Negara dan Warga

150

- Inilah momen yang disebut sebagai kontrak sosial. Momen yang menciptakan entitas moral tentang manusia publik.
- Ia disebut negara (*state*) dalam arti pasif dan disebut kedaulatan (*sovereign*) dalam arti aktif.
- Secara kolektif, para anggotanya disebut rakyat dan secara individu disebut warga.
- Momen kontrak sosial menjadi momen kesetaraan yang diimajinasikan. Setiap orang menyerahkan dirinya dan kekuasaannya kepada kehendak umum. Kemudian kehendak umum akan memutuskan tata aturan masyarakat baru.
- Kehendak umum, dalam pandangan Rousseau akan memutuskan sesuatu yang benar.

Kebebasan yang Didasarkan pada Hukum

151

- Dengan menyerahkan diri dan kekuasaan yang kita miliki pada satu institusi yang disebut kehendak umum, bagaimana kebebasan bisa diraih?
- Di fase *state of nature*, kebebasan di pahami sebagai kebebasan untuk melakukan apapun, namun di fase kontrak kebebasan harus didasarkan pada hukum (*self-prescribed law*).
- Kebebasan di fase kontrak tidak dipahami sebagai kebebasan alamiah, melainkan kebebasan yang rasional, yakni kebebasan yang didasarkan pada hukum yang dibuat.

- Ketaatan pada hukum sejauh ia dibuat dan didasarkan pada kehendak semua anggota yang terlibat di dalam kontrak tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan.
- Ketaatan pada hukum yang kita buat sendiri adalah bagian dari kebebasan sebagaimana yang dipahami dalam fase kontrak.
- Paling tidak inilah jawaban yang coba diberikan oleh Rousseau dalam memberikan jaminan kebebasan dalam asosiasi kehendak umum.
-

Teori Keadilan John Rawls

153

Pengalaman Ketidakadilan

154

- Hampir semua umat manusia pernah mendengar kata “KEADILAN”
- Dalam setiap Bahasa atau budaya, istilah itu selalu muncul.
- Biasanya istilah ini muncul dari pengalaman atau fenomena tentang hal yang tidak pas, tidak seimbang, dan sejenisnya.
- Intinya, kita menyaksikan atau mengalami pengalaman “negatif” yang kemudian kita sebut “TIDAK ADIL”



Ekspektasi dari Pengalaman Ketidakadilan

155

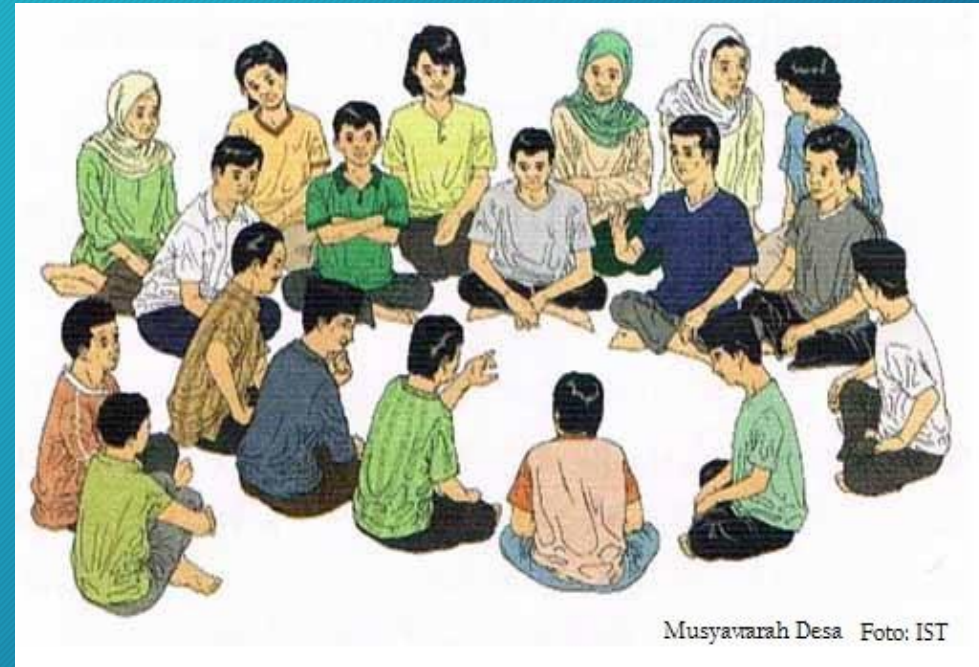
- Ekspektasi yang muncul dari pengalaman TIDAK ADIL tadi beragam.
- Sebagian orang berimajinasi tentang RATU ADIL, SANG MESIAH, TUHAN, dan juga termasuk NEGARA.
- Mereka berharap, pewujudan dari imajinasi ini bisa menyelesaikan kondisi TIDAK ADIL yang kita alami.



Pertanyaan Dasar

156

- Namun untuk menjawab masalah ketidakadilan tadi, salah satu pertanyaan penting yang harus dijawab sebenarnya adalah APA ITU KEADILAN dan KONDISI KETIDAKADILAN APA YANG HENDAK DIBUAT ADIL.
- Pertanyaan ini sangat penting agar kita mengetahui rumusan keadilan semacam apa yang hendak kita tuju, dan kondisi ketidakadilan mana yang mau dibereskan.



Musyawarah Desa Foto: IST

Konsepsi Keadilan

157

- Ketika kita hendak merumuskan konsepsi keadilan, maka akan ada banyak konsepsi keadilan yang muncul.
- Sebagian orang beranggapan keadilan dipahami sebagai kesetaraan, kesamaan, sesuai pada tempatnya, yang bekerja keras akan mendapatkan haknya dan lain-lain.



Kondisi Ketidakadilan

158

- Kemudian, kondisi mana yang hendak dibuat adil?
- Apakah kondisi manusia yang lahir dalam keadaan cacat dan berasal dari keluarga miskin adalah kondisi ketidakadilan?
- Apakah adanya orang miskin dan kelompok minoritas merupakan kondisi ketidakadilan?



Arbitrary from Moral Point of View

159

- Dari sini kita perlu mulai mengidentifikasi, kondisi ketidakadilan manakah yang mau dibereskan, dan konsepsi keadilan manakah yang betul-betul memenuhi kriteria keadilan.
- Dalam pandangan Rawls, ia tidak menganggap status kelahiran kita sebagai masalah ketidakadilan. Ia menyebut kondisi ini sebagai “arbitrary from moral point of view”



Problem Teodisi vs Problem Institusi

160

- Dalam filsafat, kita biasa menyebut kondisi nestapa dari status kelahiran ini sebagai masalah teodisi.
- Dalam hal ini Rawls tidak masuk pada masalah ini.
- “Distribusi alami tidak dapat dinilai adil atau tidak adil; orang yang dilahirkan dalam masyarakat pada posisi tertentu juga tidak dapat dinilai adil atau tidak adil. Ini semua hanya fakta alamiah. Apa yang dapat dinilai adil dan tidak adil ada pada cara institusi menangani fakta-fakta ini.” (John Rawls 1999, 87)



- Karenanya, fokus dari teori keadilan Rawls adalah tentang bagaimana respon institusi terhadap semua kondisi kenestapaan dan juga keragaman yang ada dalam kehidupan manusia.
- Hampir seluruh karya Rawls diarahkan untuk menjawab konsepsi keadilan institusional ini.
- Kenestapaan hidup dan keragaman menjadi latar belakang. Konsepsi keadilan macam apakah yang paling fair untuk merespon kenestapaan hidup dan keragaman masyarakat.

Kriteria Fairness

162

- Untuk menjawab pertanyaan tadi, Rawls memberikan batasan penting:
- 1. prinsip freestanding
- 2. reasonableness (bersifat resiprokal)



Posisi Asali dan Tirai Ketidaktahuan

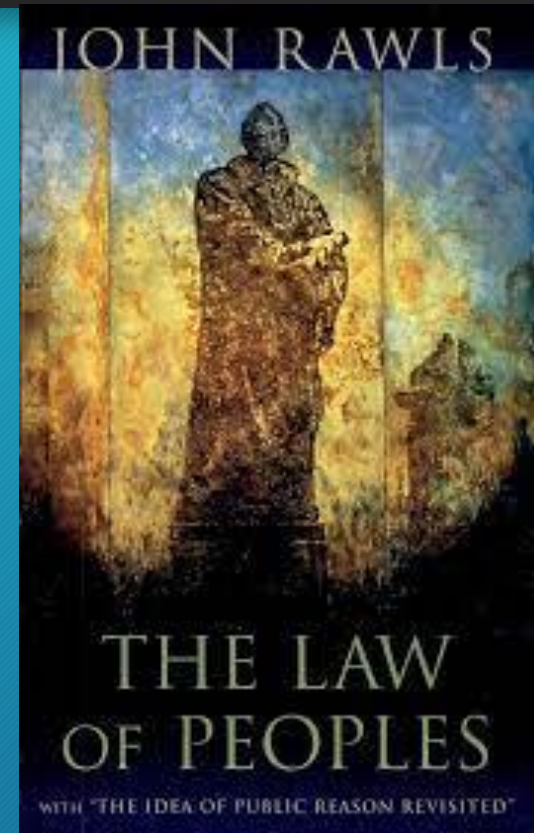
163

- Batasan ini dapat dilihat dalam ide Posisi Asali (the Original Position).
- Posisi asali merupakan tool imajinatif agar kita bisa menghasilkan “pandangan yang fair”
- Di dalam posisi asali kita membayangkan bahwa kita tidak mengetahui status kita dalam kehidupan real.
- Kita tidak mengetahui, jenis kelamin, warna kulit, agama, etnis, kelas sosial kita dalam kehidupan real.
- Pengandaian ini kemudian disebut sebagai veil of ignorance (tirai ketidaktahuan).
- Mengapa pengandaian ini penting. Menurut Rawls untuk memastikan bahwa pandangan yang diajukan tidak didasarkan pada satu interest kelompok tertentu.

Nalar Publik

164

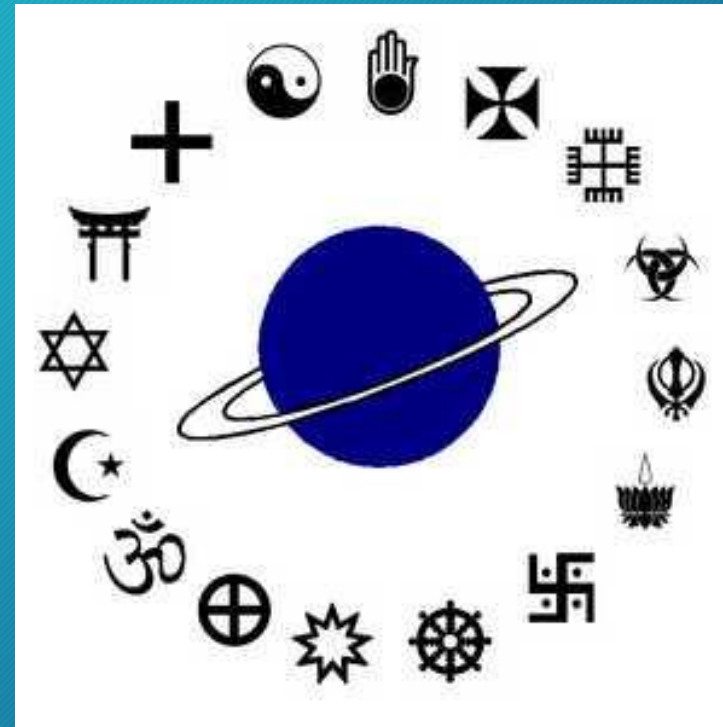
- Pandangan yang fair lahir dari subjek yang menggunakan nalar publik.
- Nalar publik adalah nalar yang mampu bersikap imparisial dari tarikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam doktrin komprehensif.
- Pandangan yang berasal dari nalar publik akan diterima oleh semua pihak secara timbal balik (resiprokal).



Doktrin Komprehensif

165

- Salah satu tantangan dalam penggunaan nalar publik adalah tarikan dari doktrin komprehensif.
- Doktrin komprehensif adalah doktrin yang memiliki konsep kebenaran menyeluruh (the whole truth).
- Ia bisa dalam bentuk agama, pandangan budaya, pandangan filsafat tertentu, dll.



Political, Not Metaphysical!

166

- Pandangan keadilan yang diupayakan Rawls adalah satu konsepsi politik (the political conception), bukan metafisik.
- Dalam arti ini ia merupakan kesepakatan dari para subjek yang bebas, setara, rasional dan juga reasonable.
- Mereka tidak mendasarkan pada doktrin komprehensif tertentu yang bisa mencederai nilai-nilai politik (the political values).



Dua Prinsip Keadilan

167

- Jika semua prasyarat itu dipenuhi, maka dari para subjek itu pasti akan lahir konsepsi politik mengenai keadilan (the political conception of justice).
- Isi dari konsepsi politik ini ada dua:
 1. Setiap orang memiliki klaim tak terbatalkan yang sama untuk sebuah skema yang betul-betul memadai dari kebebasan dasar yang setara, di mana skema itu juga kompatibel dengan skema kebebasan yang sama bagi semua; dan
 2. Ketidaksetaraan sosial dan [ketidaksetaraan] ekonomi adalah [hanya dizinkan] untuk memenuhi dua hal: yang pertama peluang pekerjaan dan posisi tertentu harus terbuka bagi semua [warga negara] dalam satu kondisi kesetaraan kesempatan yang *fair*; yang kedua memberikan manfaat paling besar kepada kelompok yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan/ *difference principle*).

Prinsip Kebebasan yang Setara

168

- Dalam prinsip ini dipastikan bahwa semua warganegara memiliki kebebasan yang setara.
- Ada lima kebebasan dasar (basic liberties) yang harus dijamin untuk semua: kebebasan berpikir dan kebebasan suara hati; kebebasan berpolitik dan kebebasan berserikat; dan hak dan kebebasan yang dilindungi oleh aturan hukum
- Jaminan pada prinsip ini sangat penting untuk menjaga martabat kita sebagai manusia.
- Dalam pandangan Rawls, jika kita menggunakan semua kriteria fairness tadi kita pasti akan menerima jaminan pada prinsip ini secara resiprokal.

Prinsip Kesetaraan Kesempatan yang Fair

169

- Rawls menyebut prinsip ini sebagai fair equality of opportunity, untuk membedakannya dari formal equality of opportunity yang dianut oleh para liberal klasik.
- Dalam pandangan liberal klasik kesetaraan kesempatan dimaknai lewat frasa “karier terbuka untuk semua yang berbakat” (*careers open to talents*).
- Catatan Rawls, pandangan ini kadang mengabaikan aspek kontingensi sosial dan alamiah (*social and natural contingencies*).
- Dengan prinsip kesetaraan kesempatan yang fair, kesetaraan kesempatan diaplikasikan dengan memerhatikan kontingensi alamiah dan sosial setiap warganegara.

Prinsip Perbedaan (difference principle)

- Prinsip ini hendak memastikan bahwa kelompok masyarakat paling tidak beruntung mendapatkan manfaat paling besar (*the greatest share for the least-advantaged*).
- Penegasan prinsip ini yang membuat pandangan Rawls dikategorikan sebagai liberal egalitarian.
- Namun penerapan prinsip perbedaan tetap tunduk pada dua prinsip sebelumnya yakni prinsip pertama yang menjamin kebebasan dasar yang setara (*equal basic liberties*) dan prinsip kedua (bagian pertama) yang menjamin kesetaraan kesempatan yang *fair* (*fair equality of opportunity*)
- Meski kita memberikan manfaat besar bagi kelompok paling tidak beruntung, setiap orang tetap harus selalu diberi hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan menentukan pekerjaan yang ingin dia kerjakan.

Justice as fairness and the basic structure of society

171

- Rawls memahami isi konsepsi politik mengenai keadilan sebagai “justice as fairness.”
- Ia harus ada dalam struktur dasar masyarakat (*the basic structure of society*), misalnya dalam konstitusi.
- Semua kerjasama sosial harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan tadi.
- Ia harus terserap di dalam undang-undang, kebijakan, aturan-aturan sosial dan lain-lain.
- Ketidaksesuaian bisa dipandang sebagai pelanggaran pada prinsip-prinsip keadilan.

Overlapping consensus and social unity

172

- Capaian untuk bisa menyepakati isi konsepsi politik mengenai keadilan disebut sebagai overlapping consensus.
- Bagi Rawls, dengan overlapping consensus kita tidak hanya berhasil menyepakati konsepsi politik mengenai keadilan, tetapi juga bisa menjamin kesatuan sosial (social unity).
- Tanpa overlapping consensus, kesatuan sosial kita akan selalu ada dalam ancaman.

Entitlement Theory of Justice Robert Nozick

173

Prinsip Keadilan dalam Kepemilikan

174

- Prinsip dasar dalam teori keadilan entitlement ada dalam dua prinsip keadilan dalam memiliki (*justice in holdings*), yakni keadilan dalam memperoleh (*justice in acquisition*) dan keadilan dalam memindahkan (*justice in transfer*).
- Sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara di atas, menurut Nozick dapat dikategorikan sebagai kepemilikan yang adil.
- Sementara di luar itu, seperti mencuri, merampas dan merampok adalah proses kepemilikan yang tidak adil.

- Menurut Nozick, konsep keadilan tidak mengurus redistribusi sebagaimana yang dikatakan oleh Rawls.
- Dalam *Anarchy, State and Utopia*, Nozick mempertahankan apa yang ia sebut sebagai negara minimal (*minimal state*).
- Tugas Negara dibatasi hanya untuk melindungi rakyat dari tindak pemaksaan, pencurian, perampokan dan menjaga keberlangsungan kontrak dan peran sejenis lainnya.

Kebebasan dan Kesetaraan

176

- Upaya Negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi rakyatnya dapat dipandang sebagai tindakan tidak adil dari Negara karena akan melakukan kekerasan terhadap hak rakyat, yakni kebebasan.
- Karena gagasan negara minimal, Nozick kemudian lebih dikenal sebagai libertarian untuk membedakan dengan kelompok liberal yang mengusung gagasan tentang kebebasan dan kesetaraan.
- Bagi Nozick, kebebasan (*liberty*) dan kesetaraan (*equality*) adalah dua gagasan yang tidak kompatibel satu sama lain. Komitmen terhadap kesetaraan ekonomi akan melukai kebebasan individu.

Manusia sebagai Tujuan

177

- Gagasan utama dari Nozick berakar pada prinsip Kant bahwa individu-individu adalah tujuan pada dirinya (*ends*) bukan alat (*means*).
- Karenanya individu tidak diperkenankan untuk dikorbankan menjadi alat bagi tujuan tertentu.
- Pada titik ini, Nozick menolak paham utilitarianisme yang memungkinkan mengorbankan individu demi manfaat yang lebih besar.

Pentingnya Konsep Hak Milik

178

- Tampaknya dalam hal ini, Nozick memiliki kesamaan dengan Rawls, yakni sama-sama menolak utilitarianisme.
- Namun Nozick memiliki tekanan yang lebih dalam memahami kebebasan individu.
- Isu yang memisahkan Rawls dan Nozick ada pada pemahaman mengenai hak milik pribadi (*property rights*).

- Rawls tidak memasukkan hak atas kepemilikan barang-barang (hak milik) sebagai bagian dari hak-hak dasar yang tidak boleh disentuh.
- Sementara Nozick menilai hak milik sebagai sesuatu yang absolut dari kebebasan manusia yang wajib dilindungi.
- “Individuals have rights...so strong and far-reaching that they raise the question of what, if anything, the state and its officials may do”
- Karenanya ia mengatakan bahwa kebebasan dan kesetaraan adalah dua gagasan yang inkompatibel satu sama lain.

Mengapa Pajak Perlu Ditolak

180

- Menurut Nozick, mengambil pajak dari pendapatan seseorang kurang lebih sebanding dengan menempatkan orang itu dalam sistem kerja paksa.
- Bayangkan jika Anda bekerja delapan jam sehari, dan gaji satu jam Anda dipotong untuk pajak maka sama saja satu jam itu Anda diminta bekerja untuk tujuan yang lain, yakni memenuhi pungutan pajak.
- Dalam seminggu, ada lima jam di mana Anda harus bekerja bukan untuk Anda.

Konsep Locke tentang Kepemilikan

181

- Teori entitlement bersandar pada teori akuisisi Locke, yakni bagaimana sesuatu menjadi menjadi milik seseorang.
- Menurut Locke, konsep hak milik adalah hasil dari pertautan antara kerja yang ia lakukan dengan sesuatu yang awalnya belum ia miliki.
- Misalnya seorang yang menanam, maka hasil tanamannya akan menjadi hak miliknya.

Pekerjaan dan Kepemilikan Diri

182

- Mengapa orang yang bisa mengklaim hasil pekerjaannya sebagai miliknya?
- Menurut Nozick, hal itu terjadi karena seseorang adalah pemilik atas pekerjaannya.
- Konsep ini terkait dengan konsep kepemilikan diri (self-ownership).
- Jika seseorang memiliki dirinya, maka seharusnya pekerjaannya pun menjadi miliknya, sehingga apa yang dihasilkan dari pekerjaan juga menjadi miliknya.

Tanggapan Rawls atas Ilustrasi Nozick

183

- Bagi Rawls, ilustrasi ini tentu saja tidak cocok untuk kasus penarikan pajak.
- Ia tidak melihat redistribusi bagian tubuh seseorang kepada orang yang tidak beruntung sebagai suatu kewajiban yang dapat dipaksakan oleh Negara.
- Menurutnya hanya untuk tujuan pemerataan dan pengurangan kesenjangan ekonomi, proses redistribusi oleh Negara dapat dibenarkan.

Penolakan terhadap Konsep Kesetaraan

184

- Nozick menolak konsep kesetaraan dengan menggunakan sebuah ilustrasi berikut.
- Andaikan saja kita sudah mencapai kemajuan teknologi transplantasi mata yang bisa menjamin keberhasilannya 100 persen.
- Nah karena capaian, ini negara kemudian bermaksud untuk menggunakan teknologi ini dengan mentransplantasi mata orang sehat kepada orang buta.
- Jika ada orang yang bersukarela tentu tidak masalah. Namun jika negara kemudian meminta warga untuk membagi matanya yang sehat kepada mereka yang buta, maka apakah kita bisa membenarkan tindakan ini?

Redistribusi vs Hak Kebebasan

185

- Menurut Nozick upaya redistribusi dengan menarik pajak terhadap mereka yang bekerja memiliki kesamaan dengan kerja paksa.
- Negara dapat dikatakan telah melakukan kekerasan kepada masyarakat jika ia mewajibkan pajak, meski hal itu dilakukan untuk menolong mereka yang tidak beruntung.
- Baginya, tindakan Negara yang memaksa menarik pajak kepada warga Negara dapat dianggap sebagai tindak kekerasan terhadap kebebasan individu.

Negara dan Perlindungan Hak Alamiah

186

- Konsep Nozick mengenai negara juga harus kita tempatkan dalam ide mengenai perlindungan hak natural yang dimiliki setiap manusia.
- Ia mengikuti Locke yang memiliki penilaian positif terhadap apa yang disebut sebagai kondisi alamiah (*state of nature*).
- Menurut Locke, dalam kondisi alamiah, manusia berada dalam kondisi yang sangat ideal.
- Adanya negara adalah untuk melindungi kondisi alamiah itu, yakni hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak milik.

Identitas, Keragaman dan Politik Pengakuan

187

Sunaryo

Charles Taylor

188



Tentang keragaman dan pengakuan

189

- Hal yang direfleksikan oleh Taylor adalah tentang fakta keragaman budaya dalam masyarakat.
- Dalam keragaman itu kita kerap mendapati mereka yang disebut sebagai minoritas, subaltern atau mereka yang tidak memperoleh pengakuan.
- Yang dimaksud dengan ketiadaan pengakuan misalnya identitas mereka dianggap inferior atau dianggap sebagai kelompok kelas dua.

Ketiadaan pengakuan

190

- Bagi Taylor, ketiadaan pengakuan semacam ini adalah sejenis kekerasan, distorsi, yang dapat memenjara seseorang dalam kesalahan, serta mereduksi 'cara berada mereka'.
- Pengalaman semacam ini kerap dialami oleh banyak kaum perempuan, kelompok kulit hitam, dan warga pribumi di masa kolonial.
- Orang-orang yang mengalami ketiadaan pengakuan ini kemudian menderita sindrom rendah diri.

Terbentuknya identitas

191

- Untuk memahami pentingnya pengakuan (*recognition*), Charles Taylor memulai rumusannya tentang identitas.
- Bagaimana sebuah identitas terbentuk.
- Seseorang bisa menjadi manusia utuh yang mampu memahami dirinya dan bisa mendefinisikan identitasnya dengan cara mengakuisisi bahasa ekspresi manusia.

‘bahasa’ dan ‘the significant other’

192

- Yang dimaksud dengan bahasa di sini adalah bahasa dalam arti yang sangat luas.
- Ia bukan hanya bahasa lisan yang kita gunakan sehari-hari, melainkan juga seluruh cara ekspresi manusia (seperti ekspresi seni, sikap tubuh, cinta dan lain-lain) yang darinya kita kemudian mendefinisikan diri kita.
- Kita menggunakan bahasa tersebut melalui interaksi bersama para ‘the significant others’.
- Orang-orang sekitar yang secara intim selalu bersama.

Identitas sebagai hasil 'dialog'

193

- Bagi Taylor, identitas 'manusia' itu lahir dari proses 'dialog' bersama yang lain, bukan sesuatu yang monolog.
- Dalam proses dialog itu kita membangun opini dan cara pandang terhadap sesuatu.
- Hal itu dilakukan di level refleksi yang bersifat soliter.
- Kita mendefinisikan diri kita dalam cara 'the significant others' ingin lihat pada kita.
- Bahkan ketika 'yang lain' sudah tidak ada bersama kita, hasil dialog itu masih terus bersama kita.

Peran 'the significant others'

194

- Kontribusi para 'the significant others' terus berlangsung dalam hidup setiap orang.
- Dalam pandangan Taylor, kita tidak pernah bisa bebas total dari orang-orang yang telah membentuk kita sejak awal kita tumbuh.
- Dalam proses dialog itu sebenarnya setiap orang selalu bernegosiasi bersama yang lain.

Level intim dan level sosial

195

- Dengan demikian, pada level yang intim (di dalam komunitas) kita membentuk identitas bersama 'the significant others'.
- Pada level sosial kita menghendaki adanya politik pengakuan yang setara (politics of equal recognition).
- Pada level intim, setiap orang sangat bergantung pada pengakuan para the significant others. Mereka mencari makna 'otentisitas' dengan proses 'penemuan diri' dan 'afirmasi diri'.

Politik pengakuan dan level sosial

196

- Pada level sosial adanya politik pengakuan yang setara sangat penting.
- Ketiadaan pengakuan yang setara mengakibatkan kekerasan terhadap mereka yang disangkal.
- Menurut Taylor, masalah politik pengakuan adalah masalah yang berada di level sosial atau ruang publik.

Ide politik pengakuan

197

- Yang ditekankan dalam politik pengakuan (*the Politics of Recognition*) adalah kesetaraan martabat dan hak semua warga negara.
- Yang ditolak keras dalam ide ini adalah adanya warga kelas satu dan warga kelas dua.
- Kesetaraan yang dimaksud bukan hanya soal hak sipil dan politik, tetapi juga hak sosial-ekonomi.
- Warga yang hidup dalam kemiskinan, dalam hal ini bisa dipahami sebagai warga kelas dua yang membutuhkan kebijakan kesetaraan.
- Pemahaman ini sebenarnya adalah paham yang relatif sudah diterima secara universal.

Politik perbedaan

198

- Ide yang juga terkait dengan ide politik pengakuan namun sebenarnya ide dasarnya berbeda adalah politik perbedaan (*the politics of difference*).
- Dalam ide ini semua orang harus diakui dalam identitas uniknya.
- Pengakuan terhadap keunikan identitas berarti bahwa keberadaan mereka tidak boleh diasimilasi ke dalam identitas mayoritas atau dominan.

praktik politik perbedaan

199

- Namun ide politik perbedaan ini memahami non-diskriminasi sebagai tuntutan sikap berbeda bagi yang berbeda.
- Dalam arti ini, kita tidak boleh bersikap sama terhadap yang berbeda.
- Orang Aborigin mendapatkan hak dan layanan berbeda daripada orang Kanada.
- Di titik ini kita melihat kegagalan sehingga kita perlu menegaskan bahwa ide yang diusung dalam Politik Pengakuan adalah tentang kesetaraan martabat.

Pengakuan kesetaraan martabat

200

- Politik kesetaraan martabat didasari pada ide bahwa semua manusia memiliki nilai penghormatan yang setara.
- Yang dimaksud dengan nilai di sini adalah potensi manusia universal, kapasitas yang dimiliki oleh semua manusia.
- Orang cacat dan bahkan orang yang koma juga memiliki nilai ini.

Kritik terhadap liberalisme

201

- Meski ide dasar dalam politik pengakuan adalah politik penghormatan yang setara, Taylor juga menunjukkan bahwa ide ini bisa dilekatkan dengan ide liberalisme hak yang kurang ramah terhadap perbedaan.
- Kekurangramahan itu dikarenakan:
 - (1) menekankan penyeragaman, tanpa pengecualian, dan
 - (2) memiliki kecurigaan pada tujuan-tujuan kolektif (collective goals).

Kurang ramah pada perbedaan

202

- Pandangan ini dianggap kurang ramah terhadap perbedaan karena mereka tidak dapat mengakomodasi apa yang diaspirasikan oleh satu kelompok yang berbeda.
- Aspirasi semacam ini tentu saja merupakan tujuan kolektif (kelompok) yang tidak bisa dihindari dalam penghormatan keragaman budaya.
- Ide liberalisme semacam ini (kadang disebut 'difference blind' liberalism) sebenarnya yang sangat ditolak dalam politik perbedaan (politics of difference) yang sudah diuraikan di atas.

Klaim netralitas

203

- Terhadap ide liberalisme semacam ini, Taylor merasa perlu memberikan perhatian. Pandangan ini sejatinya tidak hendak menghapus perbedaan. Hanya saja mereka memberikan beberapa perbedaan/pembatasan yang cukup ketat tentang publik-privat atau agama-politik.
- Salah satu klaim penting dalam ide liberalisme ini adalah prinsip netralitas, bahwa mereka tidak sama dengan yang privat itu (agama dan keyakinan). Bagi Taylor, pandangan semacam ini tentu saja keliru. Mereka tidak bisa mengklaim bahwa mereka betul-betul netral.
- Baginya, liberalisme juga merupakan kredo yang berkompetisi dengan keyakinan-keyakinan lain.

Masyarakat multikultural

204

- Dalam pandangan Taylor, masyarakat pada saat ini semakin multikultur. Namun pada saat yang sama, mereka juga semakin mudah dirembesi.
- Yang dimaksud dengan semakin mudah dirembesi adalah bahwa mereka semakin terbuka pada migrasi multinasional, dan dalam kondisi seperti itu, kehidupan setiap masyarakat kerap mengalami diaspora.

Kebijakan yang tepat untuk masyarakat multikultural

205

- Dalam masyarakat semacam ini, apakah kita memilih kebijakan yang tidak terlalu peduli pada perbedaan?
- Apakah orang yang berasal dari kelompok tertentu tidak bisa mendapatkan nilai-nilai yang dianut kelompoknya dalam proses pendidikan?

Kebijakan multikultural

206

- Bagi Taylor perluasan dan perubahan kurikulum sangat penting. Kurikulum perlu memberikan perhatian pada kebudayaan yang lebih luas bagi semua penganut, agar kelompok yang luas itu memperoleh pengakuan dan tidak merasa tereksklusi.
- Dalam banyak kasus, terlebih dalam masa kolonial, pendidikan dihegemoni oleh kelompok dominan dan mereka memasukkan nilai-nilai yang mereka anut sembari membangun inferioritas pada kelompok tertentu.

Kembali pada Makna Politik

207

Sunaryo

Konsepsi Politik mengenai Keadilan Rawls

208

- Rawls memahami politik (*the political*) sebagai produk dari para warga yang menggunakan nalar publik (*public reason*).
- Dengan nalar publik, warga tidak melibatkan nalar non-publik (yang berasal dari doktrin komprehensif dan budaya latar) dalam politik.
- Pelibatan nalar non-publik dalam politik dapat membuat seseorang dikategorikan sebagai *unreasonable*.
- Ketiadaan nalar publik, bagi Rawls akan membuat kita sulit untuk sampai pada konsepsi politik mengenai keadilan (*the political conception of justice*).
- Penggunaan nalar publik dalam politik, bagi Rawls adalah sebuah keharusan jika kita ingin sampai pada keadilan.

Kritik atas Konsepsi Politik Rawls

209

- Argumen Rawls tersebut dianggap membatasi dan sekaligus juga mereduksi makna politik.
- Ada dua tokoh yang akan dibahas di sini. Keduanya melakukan kritik yang sama atas konsepsi politik Rawls, namun berpijak pada dasar yang berbeda.
- Pertama Troy Dostert dan kedua Chantal Mouffe.
- Troy Dostert sebenarnya bukan pemikir terkenal, namun pandangannya dalam buku *Beyond Political Liberalism*, yang merupakan hasil dari disertasi, layak untuk dibaca.
- Sementara Mouffe, seorang pemikir Post Marxist adalah filsuf perempuan terkenal yang banyak bicara mengenai “*The Political*”

Beyond Political Liberalism

210

- Argumen bahwa dalam politik, para warga harus membatasi nalar non-publik yang berasal dari agama (sebagai doktrin komprehensif) dianggap telah menutup kemungkinan untuk mendapatkan pandangan yang baik atau bahkan lebih baik.
- Argumen semacam ini juga dianggap melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan ruang berpendapat yang berasal dari kelompok apa pun.
- Dalam buku *Beyond Political Liberalism*, Dostert mengajukan tiga pandangan keagamaan untuk diuji.
- Pertama pandangan David Tracy, seorang teolog Katolik; kedua Richard John Neuhaus, teolog Kristen Protestan; dan ketiga John Howard Yoder, seorang teolog dari gereja Mennonite.

Pandangan Keagamaan dalam Ruang Publik

211

- Dari ketiga teolog ini, Dostert mengeksplorasi konsep ruang publik yang tidak membatasi sebagaimana yang ada dalam liberalisme politik.
- Dari pandangan David Tracy dan Richard John Neuhaus kita masih melihat kesamaan dengan kerangka kewarasan publik (*reasonableness*) yang diajukan oleh Rawls.
- Sementara dari John Howard Yoder, Dostert mencoba menunjukkan model politik yang melibatkan berbagai pandangan dan keyakinan yang ada, termasuk mereka yang sudah menegaskan cara beradanya sendiri - yang oleh Rawls mungkin akan dianggap sebagai pandangan yang tidak waras (*unreasonable*).

Pandangan David Tracy

212

- Pertama, melalui David Tracy, Dostert ingin menunjukkan bahwa agama dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan publik. Masalah publik, menurut Tracy, jangan hanya dipahami melalui rasionalitas birokratis dan teknis.
- Perspektif moral yang ada dalam agama seharusnya diberi ruang untuk memberikan kontribusi memecahkan masalah publik.
- Agama, dalam pandangan Tracy, dapat memainkan perannya dalam kehidupan publik sebagaimana disiplin lain jika ia mampu memvalidasi kebenarannya dengan rasionalitas bersama (*common rationality*)

Pandangan Richard John Neuhaus

213

- Neuhaus adalah seorang Tocquevillian. Ia mempertahankan pandangan Tocqueville mengenai demokrasi liberal dan kapitalisme.
- Menurutnya hanya dengan pandangan moral yang bisa berbagi dalam ruang bersama, demokrasi liberal dapat menjaga semangat kebaikan bersama (*common good*) dan terhindar dari paham individualisme yang tidak terkontrol dan dari tirani politik.
- Neuhaus tidak bermaksud melakukan sakralisasi politik. Ia ingin mendorong agama agar memberikan dukungan moral pada wilayah politik namun pada saat yang sama pandangan itu dapat diterima oleh kelompok lain.
- Upaya ini, menurut Neuhaus dilakukan untuk mencegah masuknya moralitas agama yang bersifat destruktif bagi kehidupan bersama.

Pandangan John Howard Yoder

214

- Dari tiga teolog yang diangkat, Yoder adalah yang paling berbeda dan cukup menantang. Perbedaan itu dapat dilihat dari ketidaktertarikan Yoder untuk menampilkan cara beragama yang kompatibel dengan proyek modernitas atau mendukung gagasan demokrasi liberal.
- Yoder cenderung menampilkan etos kekristenan dalam wajah yang distingtif dan menunjukkan realitas gereja yang mengkonstitusikan politik dalam caranya sendiri. Cara ini bisa saja sesuai atau tidak sesuai dengan komunitas politik yang lebih luas. Bagi Yoder, hal yang paling penting adalah keyakinan terhadap teladan etis konkret dari Yesus.
- Cara pandang kita mengenai politik harus dan hanya ditentukan oleh standard yang kita yakini. Boginya, asumsi yang menyatakan bahwa pandangan teologi harus disesuaikan dengan nilai-nilai modernitas atau liberalisme dapat dilihat sebagai pemaksaan yang mengancam loyalitas gereja pada Yesus Kristus

Ruang Publik dalam Bingkai Iman

215

- Pandangan Yoder tidak diartikan bahwa ia menolak mengabdikan kepada masyarakat luas. Ia memiliki perhatian pada masalah publik, namun perhatian itu didasari pada perpaduan antara kesadaran atas realitas konkret dan kesaksian atas iman.
- Keterlibatan gereja dalam masalah publik dipandu oleh kesadaran mengenai kebajikan dan sejarah partikular, dan juga dipandu oleh panggilan sebagai komunitas yang percaya pada Tuhan.
- Dengan demikian tugas politik gereja adalah bagaimana mereka menyikapi ketidakadilan dan mengatasi kejahatan sosial dengan mendasarkan tugasnya pada pandangan moral yang konsisten dengan panggilannya sebagai komunitas beriman

Menantang Konsep Politik Rawls

216

- Dari tiga perspektif di atas, pandangan Yoder adalah yang paling menantang.
- Dua pandangan sebelumnya, dari Tracy dan Neuhaus, relatif bisa diterima bila dilihat dalam kerangka liberalisme politik Rawls.
- Sementara gagasan Yoder yang tetap mempertahankan moral partikularnya di dalam kehidupan publik akan sulit diterima oleh liberalisme politik. Padahal, bagi Dostert, politik seharusnya tidak membatasi atau mengeksklusi perspektif seperti yang diyakini oleh Yoder.
- Jika proses politik dipahami dalam kerangka liberalisme politik, kita akan dihadapkan pada dua persoalan serius. Pertama, kita telah menutup kemungkinan mendapatkan ide yang lebih luas dan lebih baik dari komunitas politik yang ada. Kedua, kita juga telah mengabaikan arti politik yang seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi keragaman perspektif dalam masyarakat plural.

Politik Perangkul vs Politik Penghindaran

217

- Dari tiga teolog di atas, khususnya dari Yoder, Dostert merumuskan model politik yang ia sebut sebagai politik perangkul (*politics of engagement*).
- Dalam pandangan Dostert, model yang ada dalam liberalisme politik dikategorikan sebagai politik penghindaran (*politics of evasion*). Model ini menghindari diskursus doktrin komprehensif di dalam ruang publik. Pandangan yang berasal dari moral partikular tidak bisa diekspresikan di ranah publik karena berpotensi merusak nilai hidup bersama.
- Bagi Dostert, model politik semacam itu bukanlah model terbaik dalam menyikapi berbagai keyakinan yang ada dalam masyarakat. Argumen yang ia ajukan adalah bahwa dengan merangkul keragaman secara langsung, alih-alih mengontrol mereka, kita akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam menegosiasikan ruang publik secara sukses. Karenanya ia kemudian menyebut model yang diajukan ini sebagai politik perangkul.

Empat Keutamaan Politik Perangkulan

218

- Meski doktrin partikular diberi ruang untuk tampil dalam kehidupan publik, Dostert tetap memberikan perhatian pada prinsip-prinsip etis dalam ruang publik. Ia mengajukan empat sikap etis yang menjadi watak setiap penganut doktrin partikular ketika tampil dalam kehidupan publik.
- Keempat watak itu adalah ketulusan (*sincerity*), disiplin (*discipline*), kreativitas dialogis (*dialogic creativity*) dan kesabaran (*forbearance*).
- Watak ini, dalam penilaian Dostert, menjadi nilai penting dalam politik pasca sekular yang berupaya mengatasi kelemahan gagasan liberalisme politik.

- Dostert memahami ketulusan sebagai komitmen untuk mencari dan mengajukan satu pemikiran yang dapat disumbangkan kepada komunitas yang lebih luas dengan penuh integritas.
- Satu kehidupan publik yang menerima partikularitas pandangan menuntut para penganutnya untuk menggali gagasan yang mereka miliki secara jujur dan penuh pertimbangan (*thoughtful*) tanpa ada maksud untuk menyesatkan.
- Dalam pandangan Dostert, agar sebuah pandangan atau gagasan dapat dinilai secara *fair* maka setiap kelompok atau individu harus menyampaikannya dengan jelas dan jujur

- Menurut Dostert, sebuah doktrin komprehensif mungkin memiliki gagasan pemikiran yang bisa memecahkan satu persoalan publik, namun itu tidak berarti bahwa ia harus memberikan solusi bagi semua persoalan.
- Hal terpenting sebenarnya bukan soal kuantitas gagasan yang diberikan, tetapi lebih pada soal kualitas gagasan itu sendiri.
- Harus ada kesinambungan antara kapasitas sebuah doktrin komprehensif dengan gagasan yang ditawarkan kepada publik.
- Keengganan satu doktrin komprehensif untuk memberikan perspektifnya kepada publik karena tidak memiliki kapasitas juga bagian dari pengertian ke-disiplinan.
- Gagasan yang diajukan kepada publik harus didasarkan pada satu pemahaman yang cukup baik tentang masalah yang hendak dipecahkan.

Dialog Kreatif

221

- Dalam masyarakat majemuk, kita kerap dihadapkan pada perbedaan pandangan.
- Dalam menyikapi perbedaan, kita tidak perlu melakukan eksklusi atas doktrin komprehensif yang dianggap tidak waras (*unreasonable*).
- Dostert mengajukan proses yang mengedepankan dialog kreatif di antara berbagai perspektif.
- Dengan dialog, kita dapat membawa bahasa partikular kita ke ranah publik, dan pada saat yang sama kita juga harus menyadari bahwa ada kelompok lain yang membawa bahasa partikularnya dalam ruang yang sama.
- Dengan demikian, hal yang dilakukan bukan tindakan monopoli ruang publik oleh satu doktrin komprehensif tertentu, tetapi terbangunnya ruang bersama yang diisi oleh berbagai doktrin komprehensif melalui dialog yang kreatif.

- Melalui sikap kesabaran (*forbearance*), Dostert mengasumsikan bahwa sebagai komunitas politik kita tidak merasa cukup dengan apa yang sudah ada.
- Kita selalu dituntut untuk terus mencari sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah ada.
- Prinsip fleksibilitas dan kreativitas yang menjadi elemen penting dalam etika pasca sekuler harus didukung oleh sikap kerendahan hati dan kesabaran ketika menghadapi pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan yang kita miliki

Kritik Chantal Mouffe atas konsepsi Politik Rawls

223

- Pemikir lain yang memberikan kritik keras atas konsep politik Rawls adalah Chantal Mouffe. Ia adalah salah satu pemikir post-marxist.
- Ia banyak melakukan kritik atas demokrasi liberal. Kritik dasarnya atas liberalisme berpangkal pada kegagalan demokrasi liberal merawat hakikat politik (*the political*).
- Baginya, kecenderungan demokrasi liberal sebagaimana dipahami Rawls, juga Larmore dan Nagel, yang selalu mengupayakan konsensus telah mengeksklusi bagian-bagian yang tidak segaris dengan konsensus.
- Kecenderungan ini sangat membahayakan masa depan demokrasi yang seharusnya merawat pluralisme.

Dua kritik atas Demokrasi Liberal

224

- Ada dua kritik Mouffe atas demokrasi liberal
- Pertama, demokrasi liberal telah mereduksi hakikat politik dalam masyarakat.
- Dalam pandangan Mouffe, yang politis (*the political*) sebenarnya tidak bisa dihapus, melainkan hanya disingkirkan. Namun, meski sudah disingkirkan, ia akan tetap muncul dalam banyak bentuk.
- Kedua, kecenderungan demokrasi liberal pada konsensus telah mengasumsikan satu finalitas model demokrasi yang bagi Mouffe seharusnya dipahami sebagai demokrasi yang selalu terbuka pada konflik dan antagonisme

Penyangkalan pada Politik

225

- Fondasi yang diupayakan liberalisme politik itu, menurut Mouffe, merupakan sesuatu yang tidak mungkin dan tidak akan berhasil.
- Ketidakmungkinan itu karena liberalisme politik menyangkal sesuatu yang sangat mendasar dan menjadi ruh dari politik (*the political*) itu sendiri.
- Liberalisme politik telah mengevakuasi dimensi politik dan memahami masyarakat yang tertata baik (*well-ordered society*) sebagai masyarakat yang bebas dari politik.
- Upaya mengerangkeng pluralisme politik dan menempatkannya di ranah privat adalah untuk memuluskan jalan menuju konsensus di ranah publik. Dalam liberalisme politik, seluruh saluran pandangan yang dianggap kontroversial - dalam perspektif kewarasan publik - ditutup rapat.

Model Komunikasi Antagonistik

226

- Mouffe mencoba mengatasi model liberalisme politik dengan mengajukan model demokrasi yang membuka ruang terbuka bagi berbagai pandangan.
- Untuk mewujudkan model demokrasi ini, kita harus menerima dan memapankan status “tanpa dasar” (*ungrounded*) yang dengan itu kita dapat mewadahi seluruh proses dialog atau komunikasi tanpa distorsi.
- Mouffe menyebut model komunikasi semacam itu sebagai model komunikasi antagonistik

Dominasi “Doktrin Komprehensif” Liberal

227

- Upaya untuk menyangkal ekspresi politik (*the political*) adalah sesuatu yang tidak mungkin.
- Karena ketidakmungkinan ini maka proyek sentral dari demokrasi pluralis agonistik Mouffe adalah untuk menciptakan ruang kemungkinan bagi yang politis (*the political*) untuk tampil dalam wajahnya yang paling radikal.
- Pada awalnya, motif dasar demokrasi liberal sebenarnya ingin melahirkan satu ruang di mana yang plural tetap terjaga dan tidak ada eksklusivitas. Namun sayangnya, para pemikir liberal tidak menyadari bahwa prinsip netral dan imparial yang mereka ajukan sebenarnya sudah disusupi oleh doktrin komprehensif liberal.

Demokrasi Agonistik

228

- Mouffe lebih memahami agonistik sebagai ruang konflik dan antagonisme.
- Konsep konflik dan antagonisme menjadi kata kunci dalam demokrasi agonistik.
- Namun, perlu dicatat bahwa pengertian konflik yang dipahami Mouffe bukan dalam arti konflik permusuhan di mana yang lain dianggap sebagai lawan yang harus dihancurkan.
- Konflik di sini lebih diartikan sebagai hubungan di mana perbedaan merupakan sebuah keniscayaan dan setiap perbedaan pada dirinya bersifat legitim. Tidak ada satu kelompok masyarakat yang bisa mengklaim dirinya sebagai fondasi bagi yang lain.

Kualitas Hidup dan Kapabilitas

229

- Banyak ahli di masa-masa awal menganggap istilah kualitas hidup sebagai istilah yang tidak terlalu jelas (*ill-defined term*) dan belum berbentuk (Fayers dan Machin 2000, 5; Ann Bowling 2003, 1-2).
- Sejak pertengahan abad 20, istilah ini semakin sering digunakan, khususnya dalam literatur medis dan filsafat
- Bidang medis dan filsafat memandang kajian dan refleksi yang lebih luas dan mendalam mengenai kualitas hidup sebagai hal yang sangat penting.
- Konsep ini diharapkan menjadi pengganti bagi pengukuran keberhasilan hidup yang kerap diukur dalam kerangka ekonomi.

Ide Kualitas dan Eudaimonia

- Dalam menelusuri konsep kualitas hidup, banyak sarjana yang melihat konsep “eudaimonia” yang diajukan Aristoteles (384-322 SM) sebagai benih bagi ide kualitas hidup di era modern.
- Istilah “eudaimonia” kerap diterjemahkan sebagai kebahagiaan (*happiness*).
- Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles mengatakan bahwa “baik menurut orang kebanyakan maupun menurut orang yang berpikiran halus...mereka memahami kehidupan yang baik (*the good life*) atau tindakan baik dalam hal yang sama, yakni berbahagia (*being happy*). Namun apa yang membuat orang berbahagia ternyata berbeda-beda...sebagian mengatakan karena satu hal, sementara yang lain karena hal lain.”

Pengertian Modern mengenai Kualitas Hidup

232

- Dalam pemahaman modern, ada beberapa konsep yang selalu dikaitkan dengan istilah kualitas hidup secara konsisten seperti kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kepuasan hidup. Pada tahun 1948, organisasi kesehatan dunia WHO mengaitkan istilah ini dengan kondisi kesehatan (*health*) dalam arti luas.
- Di dalam *Collins Dictionary* kita mendapatkan definisi kualitas hidup sebagai "kesejahteraan umum seseorang atau masyarakat yang dipahami dalam hal kesehatan dan kebahagiaan, bukan kekayaan." Kamus ini juga menambahkan bahwa "Kualitas hidup seseorang adalah sejauh mana hidupnya nyaman atau memuaskan"

Pandangan Stiglitz

233

- Dari perspektif ekonomi, Joseph E. Stiglitz *et. al.* berpendapat bahwa pendekatan tradisional yang umumnya dianut oleh para ekonom terlalu berfokus pada sumber daya yang dimiliki ketika mengukur kesejahteraan manusia. Sumber daya itu misalnya pendapatan uang, aset atau barang dan jasa yang dikonsumsi.
- Meski sumber daya jelas merupakan sesuatu yang penting bagi kesejahteraan manusia, namun ukuran itu jelas tidak memadai. Kualitas hidup adalah konsep yang lebih luas daripada hanya sekadar produksi ekonomi dan soal standar hidup. Konsep kualitas hidup seharusnya mencakup berbagai faktor yang memengaruhi segala sesuatu yang kita hargai dalam kehidupan. Ia mencakup hal-hal yang bersifat non-material.

Kebahagiaan dan Kepuasan Hidup

234

- Kriteria lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan dan secara konsisten kerap menyertai konsep kualitas hidup adalah kebahagiaan (*happiness*). Kriteria ini juga sering dikaitkan dengan kepuasan hidup (*life satisfaction*). Kebahagiaan merupakan tujuan paling penting bagi hidup manusia. Semua manusia menginginkan hidup yang bahagia.
- Dalam *Quality of Life, Health and Happiness*, Lennart Nordenfelt menilai, orang akan merasa berbahagia jika hidupnya saat ini adalah wujud dari semua hal yang dia harapkan atau inginkan.

Pengertian Kebahagiaan

235

- Dalam *Data-Book of Happiness* (1984), Ruut Veenhoven mencoba mengurai kerumitan konsep kebahagiaan. Menurutnya, kebahagiaan memang memiliki makna yang secara subtil berbeda-beda. Kenyataan ini yang membuat banyak peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan studi lebih lanjut mengenai kebahagiaan. Dalam penilaiannya, kebahagiaan adalah gejala pengalaman. Secara umum, kebahagiaan dipahami sebagai kondisi di mana seseorang menilai kualitas hidupnya baik-baik saja. Di dalam memahami kebahagiaan, kita perlu mengidentifikasi satu kondisi di mana seseorang menilai hidupnya dalam kondisi lebih baik atau kurang baik.

Ukuran Kualitas Hidup

236

- Para ilmuan merasa perlu membuat satu ukuran kualitas hidup yang lebih komprehensif dan multidimensional. Salah satu alasan mengapa upaya ini dianggap penting adalah karena sebagian besar ilmuwan sosial dan juga ahli ekonomi setuju bahwa ukuran GNP/GDP dan pendapatan per kapita dinilai terlalu kasar dan tidak lengkap. Hingga kini, ukuran yang kasar dan tidak lengkap ini masih terus digunakan secara luas oleh banyak pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Beberapa filsuf juga melakukan refleksi ulang mengenai ukuran kualitas hidup manusia dalam arti kegunaan atau utilitas ini: apakah dipahami sebagai kebahagiaan atau kepuasan atau keinginan dan pilihan? Sebagian dari mereka mencoba mempertahankan pendekatan umum ini walaupun dengan kualifikasi yang besar dengan menghasilkan utilitarianisme yang disertai pembatasan yang kompleks dan canggih tentang sifat pilihan yang dapat diperhitungkan

- Menurut Fayers dan Machin, salah satu instrumen yang pernah ada untuk mengukur kualitas hidup di antaranya adalah Karnofsky Performance Scale yang saat itu lebih ditujukan untuk konteks klinis.
- Di kemudian hari instrumen ini memasukkan aspek lain seperti kemampuan fungsional (*functional ability*), fungsi fisik (*physical functioning*) dan aktivitas hidup sehari-hari (*activities of daily life*).
- Instrumen lain yang berkembang pada tahun 70 dan 80-an banyak mengukur kondisi kesehatan dengan evaluasi yang lebih umum. Instrumen ini memberikan perhatian pada fungsi fisik (*physical functioning*), simptom fisik dan psikologis, dampak penyakit, kesulitan dan kepuasan hidup.

Model Harapan dan Kenyataan

238

- Selain pengukuran yang banyak didasarkan pada konteks kesehatan, Fayers dan Machin juga mencatat adanya model pengukuran teoritis yang lebih formal misalnya model yang memberikan perhatian hubungan antara harapan dan kenyataan. Model ini kadang disebut Model Ekspektasi. Semakin dekat jarak antara harapan dan kenyataan maka semakin baik kualitas hidup seseorang. Sebaliknya, jika semakin jauh, maka semakin berkurang kualitas hidup yang diraih. Dengan model ini, pengukuran kualitas hidup memberikan perhatian besar pada hubungan antara harapan dan kenyataan.

Model Kualitas Hidup Uni Eropa

239

- Dalam perkembangan lebih lanjut, pengukuran kualitas hidup semakin baik.
- Ukuran-ukuran ekonomi seperti GDP/GNP dan pendapatan per kapita dianggap terlalu kasar dan mendistorsi realitas yang sebenarnya.
- Salah satu model pengukuran yang bisa kita pertimbangkan adalah survey kualitas hidup yang dilakukan Uni Eropa.
- Negara-negara anggota Uni Eropa, sejak 2003 telah melakukan pengukuran kualitas hidup masyarakat secara berkala setiap empat tahun.
- Dalam pengukuran ini mereka memerhatikan aspek yang cukup luas yang meliputi ukuran subjektif dan juga objektif. Mereka memerhatikan kondisi individu, layanan publik dan juga kondisi masyarakat.

Tiga Komponen Kualitas Hidup Uni Eropa

- Ada banyak dimensi yang diuji dalam kualitas hidup mulai dari kondisi pribadi, standar hidup, aspek deprivasi, keseimbangan hidup, perlindungan kesehatan, perlindungan anak, termasuk juga aspek ketidakamanan sosial, eksklusivitas sosial, dan ketegangan masyarakat, serta partisipasi, dan keterlibatan dalam komunitas.
- Ada tiga komponen dasar yang mereka perhatikan,
 - (1) komponen kualitas hidup yang meliputi kondisi kesejahteraan pribadi, kesehatan, perumahan, kecukupan material, dan keseimbangan hidup;
 - (2) komponen kualitas layanan publik seperti perlindungan kesehatan, perlindungan anak, dan jaminan bersekolah; dan
 - (3) komponen kualitas masyarakat yang meliputi keamanan sosial, tegangan masyarakat, eksklusivitas sosial, kepercayaan pada masyarakat serta partisipasi dan keterlibatan dalam komunitas

Indeks Kebahagiaan

241

- Perkembangan yang juga penting dalam konteks pengukuran kualitas hidup adalah adanya indeks kebahagiaan yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
- Sejak tahun 2012 mereka melakukan pengukuran kebahagiaan setiap tahun.
- Lembaga ini menyadari bahwa kualitas hidup manusia tidak lagi bisa diukur dengan parameter ekonomi.
- Kebahagiaan adalah hal yang sangat penting bagi kualitas hidup manusia, namun pertanyaannya bagaimana kita mengukur hal yang oleh banyak ahli dianggap sebagai sesuatu yang bersifat subjektif.
- Para perumus indeks kebahagiaan meyakini bahwa mereka bisa mengukur kebahagiaan yang memerhatikan dimensi subjektif dan juga objektif.

Indeks Kebahagiaan

- Dalam indeks ini, kebahagiaan diklasifikasi menjadi tiga.
- Pertama sebagai perasaan emosional hari ini (*current emotional report*). Kondisi ini merupakan jawaban atas pertanyaan “seberapa bahagia kamu hari ini?”
- Kedua, sebagai perasaan emosional yang kita ingat (*remembered emotion*). Ia dirumuskan dalam pertanyaan “seberapa bahagia kamu kemarin?”
- Dan ketiga, sebagai bentuk evaluasi kehidupan secara menyeluruh yang dirumuskan dalam pertanyaan “Seberapa bahagia kamu dengan hidupmu selama ini?” Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berbeda itu, orang pada umumnya akan menjawab secara berbeda sehingga bisa menghasilkan nilai rata-rata kebahagiaan yang dipersepsi

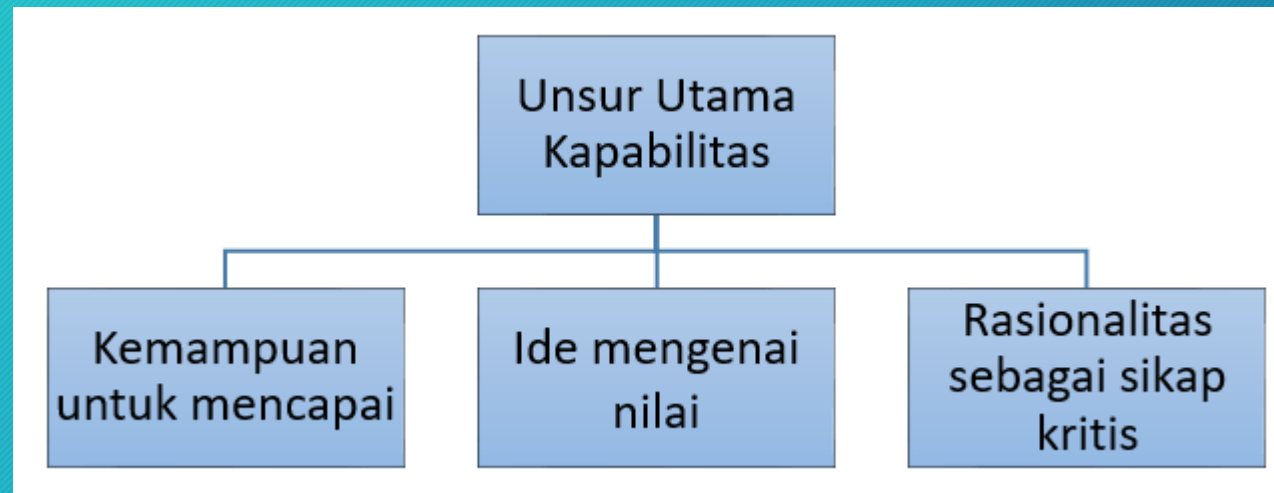
Kerangka Kapabilitas

243

- Kerangka yang juga penting untuk diperhatikan dalam memahami kualitas hidup adalah kerangka kapabilitas
- Secara konseptual, pendekatan kapabilitas menekankan tiga unsur yang sangat mendasar, yakni kemampuan aktual untuk meraih (*the actual ability to achieve*), pengakuan pada nilai yang beragam, dan signifikansi sikap kritis dalam pembentukan hal yang dianggap bernilai.

Unsur utama dalam kapabilitas

244



- Pendekatan kapabilitas dinilai memiliki keunggulan dalam dua hal.
- Pertama karena perspektifnya yang komprehensif dan kedua karena efektivitas dan kerinciannya.
- Tentang alasan pertama, pendekatan kapabilitas mencoba memahami hakikat manusia dalam cara yang lebih komprehensif. Dalam pendekatan ini, manusia tidak dilihat hanya pada satu dimensi saja, misalnya hanya sebagai “pemburu” kesejahteraan. Di sini manusia lebih dipahami sebagai makhluk pembawa nilai dalam arti yang sangat luas. Hal yang dianggap bernilai oleh manusia tentu saja bukan hanya aspek kesejahteraan tetapi juga aspek lain seperti nilai tanggung jawab dan konsep kewajiban sebagai manusia. Sen menyebut aspek ini sebagai nilai kepelakuan (*agency*).

Mengatasi Deprivasi

246

- Alasan kedua, pendekatan kapabilitas dinilai lebih efektif dan rinci dalam menganalisis dan mengatasi masalah deprivasi dibanding beberapa pendekatan lain.
- Dalam menghadapi masalah ketidakberdayaan, pendekatan ini memberikan perhatian pada kendala yang membuat seseorang atau masyarakat mengalami deprivasi.
- Dalam memerhatikan kendala, pendekatan kapabilitas mengidentifikasi sumber-sumber deprivasi secara detail. Apa yang kita sebut kendala, tentu saja sangat beragam.
- Orang yang memiliki sumber daya yang sama bisa saja memiliki kapabilitas yang berbeda. Bahkan orang yang memiliki konsep nilai yang sama juga bisa memiliki kendala yang berbeda untuk meraih hal yang dianggap bernilai itu.

Kualitas Hidup dalam Kerangka Kapabilitas

247

- Kapabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk menopang kehidupan yang berkualitas, karena dengan kapabilitas manusia memiliki kemampuan meraih hal yang mereka anggap bernilai.
- Hal ini bisa kita lihat dalam uraian mengenai kualitas hidup yang kerap menekankan aspek kemampuan dan keberfungsian hal-hal yang dianggap bernilai dalam hidup manusia.
- Hal yang juga membuat kapabilitas menjadi penting bagi konsep kualitas hidup adalah karena pendekatan ini memberikan perhatian yang sangat besar pada konsepsi nilai dan proses pemeriksaan kritis.
- Kualitas hidup adalah hidup yang baik dalam arti kita mampu merealisasikan berbagai hal yang kita anggap bernilai dalam hidup ini.

Referensi

248

- Al-Farabi, Abu Nasr, 1985, “Mabādi Ārā Ahl al-Madīna al-Fādila”, hal. 38-329, dalam Richard Walzer, *Al-Farabi on the Perfect State*, Teks Revisi, Pengantar, Terjemahan dan Komentar, Oxford: Clarendon Press.
- Christman, John. 2002. *Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction*. London and New York: Routledge
- Cohen, Martin. 2001. *Political Philosophy*. London: Pluto Press
- Farrelly, Colin. 2004. *Introduction to Contemporary Political Theory*. London: Sage Publication.
- Freeman, Samuel. 2007. *Rawls*. New York: Routledge.
- Gaus, Gerald F. 1999. *Social Philosophy*. London: M.E. Sharpe
- Hobbes, Thomas. 1974. *Leviathan*. Ed. C. B. Macpherson. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books.
- Khumaini, Imam. 2010. *Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan*. Jakarta: Sadra Press
- Locke, John. 1970. *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Magnis-Suseno, Franz. 1997. *13 Tokoh Etika*. Jogjakarta: Penerbit Kanisius.
- Magnis-Suseno, Franz. 1998. *13 Model Pendekatan Etika*. Yogyakarta: Kanisius
- Mill, John Stuart. 1978. *On Liberty*. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc.
- Mill, John Stuart. 1996. *On Liberty - Perihal Kebebasan*. Penerjemah Alex Lanur. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Netton, Ian Richard, 1992, *Al-Fārābī and His School*, London: Routledge
- Nozick, Robert. 1974 [1971]. *Anarchy, State and Utopia*. Oxford: Basil Blackwell.
- Nozick, Robert. 2004. "The Entitlement Theory of Justice." dalam *Contemporary Political Theory: A Reader*, ed. Colin Farelly. London: Sage Publication.
- Nussbaum, Martha C. 2006a [2000]. *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nussbaum, Martha C. 2011. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rawls, John 2001. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, MA: Harvard University Press Cambridge.

- Rawls, John. 1993. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.
- Rawls, John. 1999 [1971]. *A Theory of Justice* (edisi revisi). Cambridge, MA: Harvard University Press Cambridge.
- Rawls, John. 2000. *Lectures on the History of Moral Philosophy*. Ed. Barbara Herman. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rawls, John. 2007. *Lectures on the History of Political Philosophy*. Ed. Samuel Freeman. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sandel, Michael J. 2004. “The Procedural Republic and the Unencumbered Self”, dalam *Contemporary Political Theory: A Reader*, ed. Colin Farelly. London: Sage Publication.
- Sandel, Michael J. 2009. *Justice: What’s the Right Thing To Do?*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Sen, Amartya. 2009. *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sterba, James P (ed.). 2001. *Social and Political Philosophy: Contemporary Perspectives*. London: Routledge
- Taimiyah, *Ibn. As-Siyasah Asy-Syar’iyah*. Libanon: Dar el-Fikr
- Ten, C.L. 2008. “Mill’s *On Liberty*: Introduction.” dalam *Mill’s On Liberty*, ed. C.L. Ten. Cambridge: Cambridge University Press.